



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH

RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI VII DENGAN PT PLN PERSERO

- Tahun Sidang : 2022-2023
Masa Persidangan : III
Rapat ke- :
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Kamis, 8 Februari 2023
Waktu : Pukul 10.39 WIB s.d.14.22 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi VII DPR RI, Gedung Nusantara 1, Jakarta
Ketua Rapat : H. Eddy Soeparno, S.H., M.H (F- PAN/Wakil Ketua Komisi VII DPR RI).
Sekretaris Rapat : Dra. Nanik Herry Murti/Kabagset. Komisi VII DPR RI
Acara : 1. Program strategis PT PLN (Persero) dan sub-holding Tahun 2023.
2. Update *supply* dan *demand* ketenagalistrikan .
3. Dan lain-lain.
Hadir : 26 orang anggota hadir dari 52 orang Anggota Komisi VII DPR RI dengan rincian sebagai berikut:

A. Anggota DPR RI:

PIMPINAN :

1. H. Dony Maryadi Oekon, S.T/F-PDI Perjuangan/Wakil Ketua Komisi VII DPR RI
2. Maman Abdurrahman, S.T./F-Golkar/Wakil Ketua Komisi VII DPR RI
3. H. Eddy Soeparno, S.H, M.H./F-PAN/Wakil Ketua Komisi VII DPR RI

**1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
PERJUANGAN:**

5 orang anggota dari 10 anggota:

1. H. Nasyirul Falah Amru, S.E.

2. H. Andi Ridwan Wittiri, S.H.
3. Mercy Christy Barends, S.T.
4. Dr. Ir. Willy Midel Yoseph, M.M.
5. Bambang DH

2. FRAKSI PARTAI GOLKAR:

5 orang anggota dari 7 anggota:

1. Drs. Mukhtarudin.
2. Ir. Lamhot Sinaga.
3. Bambang Hermanto, S.E.
4. Dyah Roro Esti Widya Putri, B.A, M.Sc.

3. FRAKSI PARTAI GERINDRA:

2 orang anggota dari 5 anggota:

1. Dr. Ramson Siagian
2. Katherine A. Oendoen

4. FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT:

2 orang anggota dari 5 anggota:

1. Arkanata Akram, S.T., B.E. (Hons) M.Eng.Sc.
2. Rico Sia.

5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:

2 orang anggota dari 5 anggota:

1. H. Abdul Kadir Karding, S.Pi., M.Si.
2. H. Marwan Ja'far.

6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

4 orang anggota dari 5 anggota:

1. Sartono Hutomo.
2. Muhammad Nasir.
3. Rusda Mahmud.
4. Drs. Hendrik H. Sitompul, M.M.

7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:

2 orang anggota dari 5 anggota:

1. Dr. H. Mulyanto, M.Eng.
2. H. Murhasan Zaidi, S.Sos.I.

8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:

2 orang anggota dari 4 anggota:

1. Dr. Ir. Hj. Andi Yuliani Paris, M.Sc.
2. H. Asman Abnur, S.E., M.Si.

9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:

0 orang anggota dari 1 anggota:

B. PEMERINTAH/UNDANGAN

1. Dirut PT PLN.
2. Direktur Retail dan Niaga PT PLN



JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Bapak-Ibu, kita bisa mulai ya, Pak Dirut serta direksi, kita mulai ya.
Baik, terima kasih.

Bismillahirrahmanirrahim,
Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat pagi,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Salam sehat untuk kita semua.

Yang kami hormati Pimpinan Komisi VII DPR RI, dalam hal ini ada Pak Dony Maryadi Oekon bersama-sama kami.
Yang kami hormti Ibu dan Bapak Anggota Komisi VII DPR RI, yang hadir baik fisik maupun *virtual*,
Yang kami hormati Dirut PT PLN persero dan dirut anak perusahaan atau sub-*holding* beserta jajarannya,
Para hadirin yang berbahagia.

Pertama-tama mari kita ucapkan puji syukur kehadiran Allah *subhanahu wa ta'ala* yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan rapat dengar pendapat secara protokol kesehatan guna melaksanakan tugas-tugas konstitusional kita.

Dalam kesempatan ini kami ucapkan terima kasih atas perhatian serta kehadiran Ibu dan Bapak Anggota Komisi VII DPR RI, beserta para mitra Dirut PLN dan Dirut anak perusahaan beserta jajarannya untuk mengikuti rapat dengar pendapat pada hari ini.

Sesuai undangan yang telah disampaikan dan berdasarkan jadwal rapat Komisi VII DPR RI pada Masa Persidangan ke-3 Tahun Sidang 2022-2023, pada hari ini Komisi VII DPR RI akan melaksanakan Rapat Dengar Pendapat dengan Dirut PT PLN Persero dan Dirut Sub- *Holding*, dengan agenda:

1. Program strategis PT PLN (Persero) dan Sub- *Holding* tahun 2023,
2. Update *supply* dan *demand* ketenagalistrikan,
3. Dan lain-lain.

Berdasarkan data dari sekretariat, Anggota Komisi VII DPR RI yang telah hadir berjumlah 20 anggota dari 9 fraksi yang ada, dengan demikian kuorum telah terpenuhi dan sesuai ketentuan Pasal 276 ayat (1) Tata Tertib yang menyatakan bahwa setiap rapat DPR RI bersifat terbuka, kecuali dinyatakan tertutup. Oleh karena itu pimpinan meminta persetujuan anggota agar Rapat Dengar Pendapat ini dilaksanakan dengan ketentuan protokol kesehatan dan bersifat terbuka, apakah dapat disetujui?



Atas persetujuan Anggota dan dengan mengucapkan *bismillahirrahmanirrahim*, Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT:SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)
(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.39 WIB)

Sebelum melanjutkan rapat ini kami mintakan persetujuan Bapak-Ibu Anggota Komisi VII DPR RI bahwa rapat ini selesai pada pukul 12.30 WIB atau kurang lebih 2 jam setelah rapat dimulai dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan bersama, apakah dapat disetujui?

(RAPAT:SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)

Baik, Ibu-Bapak yang kami hormati.

Saat ini PLN persero telah bertransformasi dengan membentuk *holding* dan sub-*holding*, untuk mendukung kegiatan *holding*, sub-*holding* tersebut khususnya untuk menjaga ketersediaan dan kehandalan listrik Indonesia dibutuhkan program-program strategis yang tepat.

Maka dari itu pada hari ini kita ingin mendalami program strategis yang dimiliki oleh *holding* dan sub-*holding* PT PLN pada tahun 2023. Kemudian pada kesempatan hari ini juga kami ingin mendalami kondisi terkini terkait *supply* dan *demand* ketenagalistrikan di Indonesia, khususnya daerah yang mengalami *oversupply* sebagai pertimbangan dalam menentukan arah ketenagalistrikan ke depannya.

Selanjutnya untuk efektifnya rapat dengan pendapat ini kami berikan kesempatan kepada Dirut PT PLN Persero untuk menyampaikan pemaparannya dan dilanjutkan langsung dengan dirut sub-*holding*.

Kami persilahkan.

DIRUT PT PLN (PERSERO):

Bismillahirrahmanirrahim,
Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat pagi,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Salam om swastiastu,
Namo buddhaya,
Salam kebajikan.

Pesona indah alam Mamuju,
Pulau Karampuang yang paling terkenal,
Kolaborasi PLN dan Komisi VII,
Kokohkan ketahanan energi nasional.



Yang kami hormati Pimpinan Komisi VII DPR RI Pak Eddy Soeparno dan juga Pak Dony Maryadi Oekon, serta seluruh Anggota Komisi VII baik yang hadir secara *offline* maupun *online*.

Pertama kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan bagi PLN untuk memaparkan mengenai tiga topik, yaitu program strategi sub-*holding*, juga kedua adalah kondisi antara pasokan dengan *demand* sistem kelistrikan PLN yang nanti berhubungan juga dengan keandalan sistem kelistrikan dan juga mengenai program strategis PLN tahun 2023.

Kami di sini akan memperkenalkan Direksi PLN *Holding*, yang pastinya Bapak-Ibu semuanya sudah *familiar*. Di sini yang hadir adalah Bu Efi Sri Mulyanti adalah Direktur Retail dan Niaga, ini adalah direktur marketingnya PT PLN persero. Kemudian ada Pak Adi Lumakso Direktur Pembangkitan, kemudian ada Pak Hartanto adalah Direktur *Corporate Planning* dan juga *Business Development* ini hadir *online* kebetulan sedang perjalanan semua, ada yang di luar negeri, ada yang perjalanan ke daerah. Ada Pak Efiharyadi ini Direktur Perencanaan Sistem yang hadir *online*. Kemudian Pak Adi Priyanto ini sedang perjalanan luar negeri, hadir juga *online*. Pak Didi *Human Capital* juga hadir *online*, kemudian ada Bu Sintia juga hadir *online* ini Direktur Keuangan Pak Wil. Kemudian di sini ada juga Direktur Utama PT Sub- *Holding* dari PLN yaitu aset-aset pembangkitan kita yang sudah dikonsolidasikan di bawah 2 Sub- *Holding*.

Ini menjadi 2 perusahaan Genco yang terbesar di Asia Tenggara, yaitu pertama adalah PT PLN Nusantara Power Pak Ruly Firmansyah, ini 21 gigawatt kapasitasnya. Kedua adalah Direktur Utama Indonesia Power, 23 gigawatt. *Nah* di sini ada 21 gigawatt pembangkit yang tadinya pun dimiliki oleh PLN kita turunkan ke Nusantara Power dengan Indonesia Power, maka 2 perusahaan ini menjelma menjadi perusahaan terbesar.

Kemudian juga pengadaan batubara kita tadinya terpecah di 5 titik, jadi dulu kalau ada keterlambatan saya harus ngecek, ini yang mana? Ini dari divisi batubara pengadaannya atau ini pengadaan dari PLN batubara, atau ini pengadaan dari Indonesia Power atau pengadaan dari Nusantara Power, atau pengadaan dari **Nusantara Power** saya harus ngecek dari 5.

Nah sekarang kita konsolidasikan ke dalam satu sub-*holding*, termasuk juga pengadaan gas, juga pengadaan dari BBM, maka menjelma satu perusahaan energi primer yang juga terbesar di Asia Tenggara namanya PLN Energi Primer Indonesia, dirutnya adalah Pak Iwan Agung.

Pak Iwan Agung transaksinya berapa Pak? *Nah*, jadi yang tadinya terpecah dikumpulkan transaksinya di PLN Energi Primer Indonesia langsung 190 triliun per tahun. Jadi ini juga perusahaan energi primer kelistrikan yang terbesar di Asia Tenggara.

Nah kemudian juga aset-aset kami yang tadinya hanya digunakan untuk kelistrikan, saat ini juga bisa digunakan untuk *beyond* kilowatt *hour*, yaitu di sini



termasuk internet, kemudian juga untuk *smarthome*, kemudian ada usaha juga untuk PV *rooftop*, kemudian juga ada usaha *electric vehicle ecosystem*, baterai *energy storage system* dan juga kami membangun namanya PLN *market*.

Untuk itu ini juga menjadi salah satu *rising* perusahaan berbasis pada digital, perusahaan yang juga akan bagaimana membangun *lifestyle* yang berbasis pada perkembangan inovasi teknologi, yaitu PLN ikon plus, ini dirutnya adalah Pak Ari Rahmat, jadi kami lengkap yang hadir di sini.

Kemudian lanjut, pertama kami paparkan dulu Bapak Pimpinan kondisi *supply* dan *demand*. Jadi beberapa waktu yang lalu kita mendengar bahwa seantero Pakistan tahu-tahu gelap-gulita, *nah* ini tentu saja menjadi langsung tim kami langsung mempelajari, apa yang terjadi di Pakistan. Jadi di Pakistan energinya bergantung pada energi impor, terutama gas.

Nah kebetulan devisanya itu mepet sehingga di tengah harga gas yang meningkat mereka lupa atau gagal menandatangani kontrak jangka panjang gas. Akibatnya harga gas naik, kemudian, sehingga tentu saja pengeluaran *cost* untuk pengadaan gas juga meningkat drastis di tengah kondisi devisa yang sangat minim. Akibatnya cadangan gasnya menurun, *nah* untuk itu mereka menurunkan *capacity* faktor operasional dari pembangkit mereka.

Nah kebetulan juga adalah *lesson learn*-nya adalah sistem transmisi mereka belum yang berbentuk *ring*, tapi masih radial. Jadi hanya dalam satu titik begitu, *nah* titik tertentu begitu ada *trade* di satu pembangkitnya ternyata terjadi *blackout* seperti yang kejadian di Indonesia bulan Agustus 2019.

Jadi ini adalah suatu *lesson learn*, *nah* yang waktu itu ada Sengon nanti kita bahas juga karena kalau kita berbicara pasokan dengan *demand*, kita juga berbicara sistem keandalan. *Nah* kita kalau begitu pertama adalah kilas balik di akhir tahun 2021, pada saat itu pasokan energi primer terutama batubara itu sangat terbatas.

Pada waktu ada 10 pembangkit *inventory* batubaranya itu kurang dari 5 hari operasi, kemudian sistem kelistrikan kita pada waktu itu cukup rentan. *Nah* kemudian kami pertama mengucapkan terima kasih atas dukungan dari Komisi VII DPR RI yang pada waktu itu, baik itu PLN maupun dari Kementerian ESDM dipanggil di forum ini yang sangat terhormat ini, kemudian seluruh permasalahannya dipetakan, kemudian langsung dirancang suatu solusi yang pada waktu itu saya masih ingat.

Kemudian ada kesimpulan, kemudian arahan satu persatu termasuk arahan dari Komisi VII adalah kontrak batubara yang tadinya jangka pendek, yang ringkih harus diubah menjadi kontrak jangka panjang yang lebih kokoh lagi, itu yang pertama.

Yang kedua adalah bagaimana PLN diminta untuk menguatkan koordinasi dengan *stakeholder* dan pada waktu itu juga dari Komisi VII memberi arahan agar dilakukan dibangun sistem *monitoring* digital yang *end to end*. **Jadi** apabila ada kegagalan *loading*, kemudian langsung juga dilakukan *corrective*

action yaitu bagaimana agar kegagalan *loading* itu secara hitungan jam bisa segera diselesaikan.

Kemudian juga pada waktu itu ada kesimpulan juga bahwa perubahan paradigma yang tadinya berbasis pada *estimated time*, jadi pada saat batubaranya itu di-*unloaded* pengawasannya diubah pada waktu batubaranya di *loading*.

Sehingga kalau ada kegagalan langsung terdeteksi secara awal, kemudian juga dengan adanya perubahan kebijakan yang jauh lebih kokoh lagi, maka pasukan energi primer yang tadinya ringkih, yang tadinya sangat kurang andal saat ini sudah berubah menjadi pasokan yang sangat kokoh dan saat ini HOP rata-rata di atas 20 hari dan ini bahkan terbaik dalam sejarahnya PLN dan kemudian otomatis sistem kelistrikan kita menjadi jauh lebih handal.

Jadi sekali lagi kami mengucapkan terima kasih, kami masih teringat dalam, waktu itu, pada waktu dipanggil Komisi VII kondisinya tidak seperti ini, jadi kondisinya tegang semuanya, tidak ada dari kami yang tersenyum, dalam kondisi yang penuh dengan tekanan dan kami mengakui pada waktu itu sempat ada titik di mana *blackout* dalam skala besar hanya 5 hari di depan, sehingga semuanya ini bisa diselesaikan dengan baik, terima kasih.

Lanjut, untuk sistem Jawa-Bali hingga tahun 2019 ini, sampai tahun 2019 PLN antara pasokan dengan *demand*-nya itu sangat, dalam kondisi yang sangat ideal tetapi mulai di tahun 2020 ada kondisi Covid-19, di mana *demand* menurun drastis ditambah di saat yang bersamaan ada penambahan pasokan dalam jumlah yang sangat besar.

Maka kalau kita lihat juga *reserve* margin di tahun 2019 sekitar 32% ya itu di bawah itu agak mohon maaf angkanya agak kecil, tapi sejalan dengan waktu dengan penambahan pembangkit dalam jumlah yang besar, diikuti juga penambahan *demand* yang sebenarnya cukup sehat tetapi karena penambahan pembangkitnya itu dalam kapasitas yang sangat besar, maka *reserve* marginnya menjadi meningkat drastis, itu di tahun ini sekitar 56%. *Nah* inilah yang kita harus mengakui bahwa ini kondisi yang tekor, tetapi di saat yang bersamaan keandalan dari sistemnya juga berhasil kita tingkatkan.

Lanjut kalau kita melihat bahwa di sebelah kiri itu adalah *balance*, kondisi sistem kelistrikan di tahun 2015 ini di 19 sub-sistem kita. Kalau kita lihat di tahun 2015 banyak sekali yang masih merah-merah, yang di tahun 2022 sebelah kanan sudah hijau semuanya.

Artinya program pembangunan infrastruktur **ketenagalistrikan** antara dari tahun 2015 sampai 2023 berhasil bagaimana memperbaiki postur keseimbangan antara pasokan dengan *demand* dan juga berhasil meningkatkan tingkat keandalan dari sistem di seantero Indonesia.

Lanjut, *nah* untuk itu kami bisa menyampaikan bahwa kondisi kelistrikan nasional ini berbeda dengan di Pakistan atau berbeda juga dengan di Jerman,



kalau di Jerman adalah bagaimana hampir 50% pasokannya dari Rusia, pasokan gasnya.

Kemudian juga begitu ada sedikit kondisi geopolitik yang mengganggu, ternyata begitu pasokannya turun dengan terpaksa Jerman mereaktivasi pembangkit-pembangkit PLTU-nya, kemudian juga perusahaan mendapatkan pasukan batubara dari Indonesia.

Jadi kalau kita melihat banyak sekali bagaimana keandalan sistem kelistrikan di negara-negara tetangga kita menghadapi tantangan yang sangat luar biasa, dengan adanya ketidakpastian harga komoditas, kemudian ada kondisi geopolitik yang tidak kondusif, kemudian juga mungkin kurangnya adanya antisipasinya.

Nah kami di sini menyampaikan kondisi kelistrikan nasional dalam kondisi yang sangat aman dan kami juga menjaga agar setiap pilar sistem kelistrikan ini bisa kita bangun menjadi sangat kokoh. Pertama adalah pasokan energi primer, ini pembangkit tercukupi, HOP rata-rata di atas 20 hari operasi dan ini sekali lagi kondisi yang terbaik dalam sepanjang sejarah.

Dan kami juga dari laporan keuangan kami itu kelihatan berbeda sekali, di tahun 2021 kami dengan terpaksa membakar BBM dalam jumlah yang sangat besar, itu yang pertama. Kami juga harus menambah tambahan pasokan gas karena dalam hal ini kan sebenarnya ada tiga *three line of defence*, *first line of defence* adalah pembangkit batubara kami yang beroperasi sebagai *base load*. *Second line of defence* adalah pembangkit dari gas kami sebagai *load followers*, kemudian juga dengan tiker, baru kemudian dengan BBM kalau kondisinya *emergency*.

Nah kelihatan sekali di tahun 2021 itu konsumsi BBM kita meningkat karena kami tidak bisa membebani PLTU kami karena *inventory* batubaranya sangat rendah sekali. *Nah* untuk itu kami dengan terpaksa menambah karbo gas yang lebih mahal, nambah konsumsi BBM yang juga sangat mahal sekali.

Nah saat ini kelihatan untuk postur tahun ini walaupun *demand* sudah naik, tetapi kami juga bisa memenuhi itu dengan suatu strategi pasukan energi primer yang bukan hanya *well balance*, yang bukan hanya andal, tetapi juga secara keekonomian bisa kami optimalkan.

Jadi kami berterima kasih sekali lagi, jadi kalau kita masih teringat di 2021 akhir kita pertemuan ada di sini dan itu ternyata merubah paradigma kebijakan, merubah paradigma berpikir kami, merubah paradigma bekerja kami dan kalau kami masih ingat bahwa kesimpulan dari yang masukan dari Komisi VII betul-betul kami jalankan satu persatu dan hari ini kami mengakui itu semuanya berbuah manis.

Lanjut, ini ke halaman sebelumnya, kemudian, sebelumnya, ini juga kami nanti kami jelaskan kami membangun infrastruktur kelistrikan yang sangat andal dan ini ternyata belajar dari pil pahit dengan *blackout* di bulan Agustus di tahun 2019.



Jadi kami membangun satu strategi, kemudian juga sistem operasi kelistrikan saat ini sangat kokoh, kemudian juga seluruh pembangkit maupun transmisi, maupun distribusi saat ini sudah dikelola secara digital dan juga lebih terintegrasi.

Lanjut *nah* ini adalah bagaimana kita 3 *line of defense*, baik itu batubara, baru kemudian gas, baru kemudian BBM dan ini adalah *lesson learn* kita dari adanya suatu *blackout* yang terjadi di tahun 2019 dan kemudian juga adanya krisis batubara di tahun 2021. Lanjut.

Nah untuk itu kalau kita melihat *lesson learn* dari *blackout* di tahun 2019, pertama adalah pada waktu itu ada *maintenance* transmisi dari timur ke barat untuk di daerah selatan. Jadi dari selatan, itu dari Klaten sampai ke Jakarta itu kebetulan ada *maintenance*.

Nah, di saat yang bersamaan ternyata ada suatu gangguan antara Ungaran dengan Pemalang sampai ke Mandiraja yaitu dengan adanya gangguan pohon sengon. *Nah, lesson learn blackout* di tahun 2019 itu ternyata begitu ada gangguan seperti ini, evakuasi daya dari timur ke barat tidak mencukupi lagi. Akibatnya *balance* antara pasokan dengan *demand* di daerah DKI dan sekitarnya, Jakarta Raya tidak bisa lagi dipenuhi dan ternyata dalam waktu yang bersamaan pembangkit kita tidak bisa merespon kebutuhan kenaikan daya secara cepat.

Untuk itu kondisi *blackout* di tahun 2019 ini sudah kita perbaiki, pertama, pertama adalah kita sudah membangun tambahan Sutet 500 KV dari Indramayu ke Cibatu Baru, yang tentunya menambah kapasitas evakuasi daya dari timur ke barat.

Kemudian juga, pada kami juga menambah lagi dua jalur Sutet dari Ungaran, itu coba Ungaran itu Ungaran di bawah di petanya, Ungaran sampai ke Mandiranca. Jadi ini artinya evakuasi dari timur ke barat untuk jalur utara juga sudah berkembang dengan baik, kami operasikan dengan baik.

Kemudian kami juga menambah lagi di jalur selatan dari Pedan itu Klaten sampai ke Tasikmalaya, jadi ini untuk jalur selatan juga sudah kami perkuat. Kemudian untuk *balancing* penambahan pasokan di daerah Jakarta dan sekitarnya, kami juga menambah pembangkit yaitu PLTU Jawa 7 dua kali 100 megawatt untuk memperkuat sistem kelistrikan Banten dan Jakarta.

Nah untuk itu dibanding dengan ketahanan sistem kelistrikan yang mengalami *blackout* di tahun 2019, saat ini sistem kelistrikan PLN jauh lebih kokoh dan kami juga sudah melakukan yaitu bagaimana anti-*blackout* belajar dari kegagalan pada 4 Agustus 2019.

Lanjut *nah* ini ada 6 *lesson learn*, pemadaman sistem barat 6 garis pertahanan independen yang gagal pada 4 Agustus 2019. *Nah* untuk itu setiap poin di sini sudah kami *address*, kami koreksi, kami perkuat sehingga sistemnya bisa menjadi jauh lebih kokoh lagi.



Lanjut *nah* ini juga ada 6 *lesson learn* yaitu pertama adalah peningkatan keandalan jaringan transmisi utama, ini *backbone* kami, kemudian juga kami membangun kemampuan agar kami bisa merespon kondisi darurat dan mampu melokalisir gangguan yang kita sebut dengan *islanding* dan ini adalah kelemahan dalam sistem di tahun 2019 tersebut.

Kami juga melakukan *overview* peningkatan keandalan skema pertahanan, kemudian kami juga bagaimana kami bisa melakukan *exercise* kemampuan pembangkit beroperasi pada batas minimum pembebanan, sehingga sistemnya juga lebih handal.

Kami juga meng-*exercise* kecepatan dalam pemulihan pembangkit, kemudian kami juga mempercepat juga kemampuan kami dalam kecepatan penormalan sistem ketenagalistrikan, yang kemudian juga kami membangun suatu ketahanan sistem secara menyeluruh, itu baik itu *looping*, kemudian juga misalnya *connexion between tubex bone line*.

Lanjut, kami juga membangun sistem operasi kelistrikan Indonesia yang lebih kokoh dengan melakukan transformasi secara digital yang terintegrasi *end to end* dalam rangka pemantauan dan operasi setiap sistem yang, baik itu pembangkit, baik itu transmisi, baik itu distribusi maupun retail. Untuk itu kami sudah melakukan yaitu digitalisasi pembangkit kami, kemudian kami juga melakukan *optimization* penggunaan *primary* energi primer kami.

Kemudian untuk transmisi kami melakukan *enterprise asset management*, baik itu terhadap transmisi maupun distribusinya. Kami melakukan *dispatch optimization*, kami juga melakukan *anti-blackout strategy*. Kemudian untuk distribusi kami juga melakukan *outage manajemnt*, kemudian kami membangun *smart grid*, yaitu dari *smart transition*, *smart distribution*, kemudian juga *smart meter*.

Kemudian untuk pelayanan dengan pelanggan kami juga membangun PLN Mobile, jadi aplikasi PLN Mobile kami saat ini menjadi salah satu aplikasi yang mendapatkan *award winning application*, *rating*-nya terakhir adalah 4,8, *download*-nya lebih dari 36 juta Pak Pimpinan dan sehari penambahan *downndload*-nya adalah 100 ribu *download*.

Nah tentu saja dalam hal ini kami juga ada *electric vehicle infrastructure*, ada *viber optic roll out*, kemudian kami juga ada *billing and collection* juga kami automatisasi, kemudian *smart return*-nya juga kami perbaiki. Lanjut.

Nah untuk itu kami paparan selanjutnya adalah mengenai program strategis PLN di tahun 2023. Lanjut. *Nah* di tahun 2023 ini kami meneruskan agenda transformasi. Jadi agenda transformasi ini diawali 3 tahun lalu dengan 3 pilar, yaitu *lean* agar kami jauh lebih efisien, kemudian agar kami lebih *green* lebih hijau lagi, kemudian ketiga kami lebih inovatif dan keempatnya tentu saja kami bisa melayani pelanggan kami dengan lebih baik lagi yaitu dengan *customer focus*.



Nah untuk lean kami ada program digitalisasi pembangkit, digitalisasi pengadaan, bagaimana digitalisasi untuk distribusi kami, *dispatch* kami juga lebih modern, kami melakukan *optimization* dari penggunaan *primary energy* kami melakukan anti-*blackout*, ada *smart meter*.

Kami juga melakukan digitalisasi perencanaan yang tersentralisasi, kami juga mengelola komponen kami dengan jauh lebih efisien dengan sistem digital yang baru, kami membangun *integrated by change excellence management* dan lain-lain. Jadi dalam hal ini memang kelihatan sekali *cost structure* dari PLN dari hari ke hari semakin efektif dan semakin efisien, biaya bisa kami tekan.

Kemudian juga untuk *green* kami juga melakukan suatu program namanya *net-zero emission by 2060* dan kami juga melakukan pengembangan energi baru terbarukan secara agresif. Kemudian kami juga melakukan inovasi, sebagai contoh kami membangun suatu sistem pelayanan pelanggan yang betul-betul efektif dan efisien.

Kami membangun fiber *optics rollout* berbasis pada suatu sistem digital yang terintegrasi. Kami membangun *electric vehicle infrastructure* ekosistem, di mana pelanggan kami juga bisa terlayani dengan bagaimana cacing untuk mobil listrik sebagai gaya hidup baru bisa transisi secara baik.

Kami juga bagaimana melayani industri-industri yang masih menggunakan pembangkit sendiri, yaitu *captive power*. Kemudian untuk *customer focus* kami *outage management* kami juga menjadi jauh lebih baik lagi, kalau ada keluhan gangguan menggunakan PLN Mobile ternyata respon *time*-nya bisa dikurangi lebih cepat dua kali lipat lebih cepat dibanding dengan yang dulu. Kemudian juga akibatnya adalah *duration* dari *outage* kami juga bisa dikurangi sebesar 50%. Kemudian kami juga melakukan yaitu bagaimana *launching* pelayanan pelanggan kami yaitu PLN Mobile yang paling baru.

Kemudian kami juga ada program yaitu meningkatkan aspek *environmental*, aspek *social* dan *governance* dan ini telah menjadi salah satu *breakthrough* transformasi PLN dan ini sejalan dengan aspirasi dari *net-zero emission* pada tahun 2060. Nah tentu saja kami sudah membangun, baik itu rencana jangka pendek, jangka panjang, kemudian juga kami mengembangkan teknologi dan ekosistem pendukungnya agar program ini bisa berjalan dengan baik.

Lanjut, kami juga punya 8 *lighthouse* inisiatif pada transisi energi yang tentu saja ini akan terus dilanjutkan. Ini manifestasi peran kepemimpinan PLN dalam transisi energi di Indonesia, ini pertama kami juga melakukan dekarbonisasi dari *golden gas plants*.

Kemudian kami juga *expanding renewable capacity* dan juga *supporting* sistemnya. Kami juga membangun *green* ekosistem, kemudian juga ada bagaimana kita adanya implementasi dari *biomass*, kami juga ada beberapa teknologi yang futuristik yaitu hydrogen ammonia, ada karbon *capture and storage*.



Kami membangun *renewable energy* dengan sangat agresif, kemudian kami juga bagaimana bisa membangun suatu *green energy* sebagai produk. Jadi sebagai contoh ada customer bernama [amazon.com](https://www.amazon.com) itu datang ke kami dan mereka minta listriknya itu berbasis pada *green energy*. Yang kami lakukan adalah membangun *green energy as a product*.

Jadi kami kebetulan di RUPTL kami ada 21 gigawatt itu berbasis pada *renewable energy*. Nah untuk itu menunya kami serahkan kepada Amazon dari 21 gigawatt ini dipilih yang mana dan dari itu begitu mereka memilih karena *requirement* mereka adalah ada *additionality*, ada program *renewable energy* yang baru.

Nah untuk itu kami berhasil menandatangani bagaimana *renewable consumption through green energy as a service*. Kemudian juga kami membangun juga *expanding electric vehicle* ekosistem.

Untuk itu selanjutnya kami akan diskusi mengenai *holding*, *sub-holding*, lanjut, kami melakukan restrukturisasi organisasi kami mengikuti transformasi yang sudah dilakukan di dalam tubuhnya PLN. Kami dalam proses transformasi itu kami melakukan digitalisasi pembangkit, digitalisasi transmisi, digitalisasi distribusi, digitalisasi pelayanan pelanggan, digitalisasi pengadaan, digitalisasi sistem keuangan, digitalisasi bagaimana kami melakukan sentralisasi dari perencanaan dan lain-lain.

Untuk itu kami mengikuti ini dengan adanya restrukturisasi *holding sub-holding*, pertama adalah pengelolaan aset pembangkit kami yang tadinya tersebar, kami konsolidasikan yang tadi sudah kami sampaikan menjadi dua perusahaan Genco yang terbesar, yaitu Indonesia Power dengan Nusantara Power.

Kemudian kedua adalahnya tata kelola energi primer kami yang tadinya tersebar, yang tadinya rantai pasoknya itu berbelit-belit, yang menjadikan rantai pasok kami itu ringkih dan juga kurang efisien, kami ubah menjadi tata kelola energi primer kami yang terintegrasi.

Rantai pasok yang jauh lebih kokoh, yang lebih efisien dan mampu menggerakkan ekosistem hijau berbasis kerakyatan karena dalam tata kelola energi primer kami ada namanya pengadaan Biomass. Ini adalah *core* kompetensi baru kami, di mana ini adalah energi kerakyatan dan juga untuk memfasilitasi percepatan transisi energi yang berorientasi pada masa depan.

Kemudian juga utilisasi aset yang tadinya kurang, nah di situlah muncul PLN energi primer Indonesia di bawah pimpinan dari Pak Iwan Agung ada di sini. Kemudian juga utilisasi aset, yang tadinya hanya untuk pelayanan kelistrikan saat ini juga kita optimalkan digunakan untuk *beyond KWH*, di sini ada PLN ikon plus.

Nah kami di sini bisa menyampaikan bahwa dengan adanya transformasi berbasis pada digitalisasi dan juga transformasi organisasi, maka



organisasi PLN yang tadinya statis atau *back work looking* dan penuh sekat, saat ini menjadi organisasi yang *streamline*, yang lincah, yang dinamis, yang juga *forward looking* yaitu berorientasi pada masa depan yang tentu saja harapannya mampu mengubah tantangan *disruption*, baik itu teknologi dan transisi energi ini menjadi sesuatu *opportunity* agar PLN bisa lebih kokoh lagi. Lanjut.

F-PKS (Dr. H. MULYANTO, M.Eng.):

Izin Pimpinan, interupsi sedikit saja.

Nampaknya Dirut, Pak Dirut memastikan ini agar publik mengetahui juga. Badan hukum *sub-holding* ini apa, apakah anak cabang, BUMN, atau dia swasta? Secara tegas mohon disebutkan.

DIRUT PT PLN (PERSERO):

Jadi mohon izin Bapak, jadi kami sebenarnya sudah punya anak perusahaan Pak, Indonesia Power itu sudah ada Pak dan Nusantara Power itu juga sudah ada, namanya pembangkitan Jawa-Bali Pak. Yang kami lakukan adalah dulu asset-aset pembangkit ini ada sebagian yang dimiliki oleh PLN Pusat, ada sebagian juga dimiliki oleh anak perusahaan kami yaitu Indonesia Power dan Nusantara Power.

Tentu saja pengelolaan asset yang tersebar-sebar ini, misalnya kami datang ke suatu pembangkit ini bisa dikelola oleh unit induk dari wilayah kami. Kemudian kami ke pembangkit sebelahnya ini dikelola oleh Indonesia Power, kami ke sebelahnya lagi ini oleh unit induk yang lain, ini lebih asetnya kami konsolidasikan di 2 anak perusahaan yang sebenarnya sudah eksis Pak. Jadi anak perusahaan itu sudah ada Pak, ini lebih ke konsolidasi aset Pak.

F-PKS (Dr. H. MULYANTO, M.Eng.):

Iya kami paham itu, maka pertanyaan saya adalah badan hukum ini berbasis regulasi, ini anak cabang itu apakah itu BUMN atau swasta. Ini kan persoalan di situ.

DIRUT PT PLN (PERSERO):

Ini anak perusahaan yang 100% dimiliki oleh PLN, Pak.

F-PKS (Dr. H. MULYANTO, M.Eng.):

Iya, itu apakah BUMN atau swasta statusnya berdasarkan regulasi yang ada. Yang kami pahami, ini adalah swasta, berdasarkan undang-undang yang ada. Dengan Komisi VI kami berdiskusi, mohon dengan istilah *sub-holding* ini apakah sama saja, berarti kan swasta, per definisi *loh* Pak, padahal ini kita selalu perdebatan.



Soalnya nanti kalau ini, kalau ini yang terjadi Pak secara filosofis kalau itu swasta, maka 100% pembangkit swasta sekarang kan begitu. Tadinya PLN berarti BUMN, ketika sub-*holding* ini adalah swasta berarti konsekuensi legalnya 100% pembangkit adalah swasta. Itu pertanyaan mendasarnya Pak.

Demikian.

DIRUT PT PLN (PERSERO):

Jadi Pak dari sudut pandang struktur antara *holding* dengan sub-*holding* ini tidak ada perubahan dari dulu dengan sekarang, Pak. Jadi ini anak perusahaan seperti sama dan aset-aset pembangkit kami pun dari sebelumnya separuh ada di anak perusahaan, separuh ada di *holding* begitu. Jadi ini lebih konsolidasi aset-aset Pak ke bawah Pak, sedangkan selama ini juga kontrak antara penyedia.

F-PKS (Dr. H. MULYANTO, M.Eng.):

Berarti kan tetap, ya, inikan tetap anak perusahaan yang seperti dulu kan.

DIRUT PT PLN (PERSERO):

Seperti dulu.

F-PKS (Dr. H. MULYANTO, M.Eng.):

Cuma diberikan tambahan.

DIRUT PT PLN (PERSERO):

Tambahan.

F-PKS (Dr. H. MULYANTO, M.Eng.):

Nah berarti kan tetap kalau definisinya adalah swasta, betul dugaan saya 100% menjadi swasta pembangkit sekarang.

DIRUT PT PLN (PERSERO):

Jadi mohon izin, kami ada 1 gigawatt pembangkit-pembangkit di daerah terpencil itu tetap dikelola oleh *holding* Pak, tetap dikelola oleh *holding* dalam rangka karena ini adalah bagaimana pengelolaan.

F-PKS (Dr. H. MULYANTO, M.Eng.):

Iya tapi *kan* itu sudah tidak *mainstream kan*, karena sudah digerakkan ke sana. Ini soal legalitas Pak, terkait perundangan saja Pak, definisi BUMN Pak.

Baik, *oke nggak* apa-apa kalau *nggak* terjawab. Pak.

DIRUT PT PLN (PERSERO):

Untuk itu kami.

Selamat datang Pak Maman.

Nah untuk itu sesuai dengan struktur *holding* sub-*holding* ini kami punya satu adalah PLN Energi Primer Indonesia, di sini dipimpin oleh Pak Iwan Agung. Kemudian pembangkitan yang pertama adalah PLN Nusantara Power ini dipimpin oleh Pak Ruly Firmansyah, kemudian juga Indonesia Power itu dipimpin oleh Pak Edwin, kemudian juga PLN Icon Plus dipimpin oleh Pak Ari Rahmat. Dalam hal ini kemudian *holding* di sini untuk transmisi, distribusi, retail dan niaga kemudian juga direksi yang lain masih ada di *holding*.

Lanjut, untuk itu ini adalah.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Interupsi Pimpinan.

Direksi mega proyek mana Pak Dirut.

DIRUT PT PLN (PERSERO):

Sedang bertugas Pak.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Nah kenapa *nggak* dia dihadirkan di sini, *kan* dia yang mau banyak ditanyain di sini. Ini *kan* skemanya banyak membangun seluruh jaringan, ini yang mengerjakan siapa?

DIRUT PT PLN (PERSERO):

Ada di Direktur Transmisi Pak, ini kebetulan mohon izin Pak. Ini Direktur Mega Manajemen Project sedang dalam ini ada.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Apalagi dia mau mengkonsep seluruh regulasi yang lebih besar *gitu*.



DIRUT PT PLN (PERSERO):

Nanti kita FGD-kan Pak.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

FGD lagi, lanjut Pak Dirut.

DIRUT PT PLN (PERSERO):

Jadi, mohon izin.

Ini perusahaan pembangkit Genco kami ini menjadi terbesar di Asia Tenggara, kemudian juga pengelola energi primer ini secara transaksi juga menjadi terbesar di Asia Tenggara untuk pengelolaan energi primer untuk sistem ketenagalistrikan.

Untuk *beyond* KWH dari 85 juta pelanggan, target kami ada penambahan *additional revenue* sekitar 1 billion US dolar. Kemudian dengan adanya transisi seperti ini maka PLN menjadi lebih lincah lebih trengginas, sehingga kami mampu juga bergerak menghadapi transisi energi di Indonesia dengan lebih lincah lagi. Lanjut.

Untuk itu PLN akan fokus menjalankan 6 program strategis:

1. Bagaimana kita meningkatkan pendapatan, baik itu dari penjualan listrik maupun mendorong berkembangnya *electrifying lifestyle*.
2. Kami juga mendorong meningkatkan pendapatan dari Beyond KWH yang ini sudah sedang *on going*.
3. Kemudian juga dengan adanya transformasi kami melanjutkan bagaimana kita meningkatkan efisiensi operasi dan juga efisiensi dalam bidang investasi.
4. Kami menata struktur korporasi bagaimana juga portfolio bisnis kami menjadi jauh lebih sehat lagi.
5. Kemudian juga mengembangkan ESG dan transisi energi.
6. Mengembangkan digitalisasi dan sistem manajemen untuk akselerasi transformasi.

Lanjut, memang salah satu agenda khusus kami tentu saja adalah bagaimana ke depan ini akan ada penambahan kapasitas *renewable energy* yang bersifat intermiten dalam skala yang sangat besar. Tentu saja untuk menjawab tantangan tersebut kami perlu membangun suatu namanya *Advance Control Center*, ini dengan mengadopsi teknologi terbaik dunia yang mampu menetralkan karakteristik suplai dari EBT yang intermiten dan dinamis.

Jadi kalau kita berbicara misalnya solar panel ataupun *wind*, ini tentu saja fluktuasinya akan sangat drastis dan untuk itu sistem kami harus tersambung dengan *water forecast* dan dari *water forecast* ini ada dimensi waktu dan juga ada dimensi lokasi. Jadi *water forecast* tergantung pembangkitnya ada di mana, ini harus disambungkan.

Nah dari *water forecast* tadi harus bisa diprediksi berapa penambahan intermiten energi pada waktu tertentu dan bagaimana merespon, sehingga sistemnya tetap andal dan juga biayanya masih bisa dioptimalkan. Tentu saja ini *Advance Control System* ini sedang kita lakukan *procurement*, kemudian juga kita lakukan design dan akan *fully implemented* di tahun 2024.

Ini lanjut, lanjut, *nah* untuk itu kami juga melakukan beberapa program strategis untuk sub-*holding* yaitu energi primer. Pertama adalah bagaimana kita meningkatkan *security of supply* dari energi primer untuk pembangkit di PLN, kami juga dengan adanya sub-*holding* ini kami berusaha meningkatkan efisiensi biaya penyediaan energi primer.

Kemudian juga kami melakukan digitalisasi proses bisnis yang terintegrasi, baik itu dari batubara, maupun itu dari gas, maupun dari BBM dengan dan kemudian dalam hal ini tentu saja dengan digitalisasi ini ada efisiensi biayanya dan nanti berpengaruh juga pada pengurangan *cost* atau keuangan dari PLN.

Kemudian juga kami melakukan pengelolaan *human capital* dan *organizational capital* dan kami melakukan konsolidasi, maupun *capability development* agar organisasi ini bisa melanjutkan transformasi yaitu *unleashing energy* dan *beyond*.

Kemudian juga dengan adanya konsolidasi ini kami bisa juga melakukan pengembangan usaha, ini mengembangkan portofolio pada bisnis mainstream energi primer serta mendukung proses gasifikasi pada pembangkit-pembangkit yang memang sangat dibutuhkan.

Lanjut, untuk PLN Energi Primer Indonesia Power dan Nusantara Power, pertama adalah bagaimana kita bisa mengoptimalkan utilisasi dari pembangkit-pembangkit ini, yang tadinya memang pengelolaan aset-aset yang terpecah menjadi aset yang terkonsolidasi, tentu saja utilitasnya menjadi jauh lebih mudah lagi.

Kemudian kami juga mengimplementasikan *digital power plan* ke seluruh pembangkit, sehingga seluruh pembangkit ini sudah bisa dikendalikan dan dimonitor secara *real time* dan juga otomatis. Sehingga proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan pembangkit menjadi jauh lebih cepat dan lebih efisien, kami juga bersinergi dengan *stakeholder* untuk pengembangan *hydrogen co-firing*.

Kemudian juga kami menginisiasi percepatan pembangunan pembangkit EBT sesuai dengan RPTL. Kemudian juga berperan aktif membangun akselerasi strategi pembangkit EBT, kemudian dengan adanya konsolidasi ini maka PLN Nusantara Power maupun Indonesia Power bersinergi dengan PLN Energi Primer Indonesia untuk menjaga kontinuitas *sustainability* pasokan energi primer dan juga menambah pasokan dari biomassa.



Kemudian juga kita mampu melakukan pemeliharaan pembangkit yang lebih presisi lagi dan juga melakukan asesmen untuk mengetahui kondisi pembangkit secara *real time*, sehingga pembangkitnya bukan hanya berjalan lebih efisien tetapi *operation* dan *maintenance*-nya juga jauh bisa lebih efisien dan *cost*-nya lagi-lagi bisa dikurangi.

Kemudian juga kami dengan adanya pengelolaan pembangkit yang lebih baik ini tentu saja kami berusaha untuk meningkatkan keandalan sistem, yaitu dengan program anti-*blackout* dan juga menjaga agar setiap unit mampu melakukan *fast respon*. Kemudian juga kami belajar dari krisis di tahun 2021, kami juga melakukan penguatan sistem dari *coal handling*.

Kemudian untuk Icon Plus, kami juga ada beberapa hal. Pertama adalah bagi PLN sendiri karena Icon Plus ini adalah sistem IT kita, sistem digital kita adalah dibangun oleh Icon Plus. Maka dengan meningkatnya *core* kompetensi *technical skill* dari Icon Plus ini maka bisa *deliver value* bagi internalnya PLN, yaitu mengakselerasi transformasi dan juga mengakselerasi mempercepat digitalisasi proses bisnisnya PLN.

F-PAN (Dr. Ir. Hj. ANDI YULIANI PARIS, M.Sc.):

Izin Pimpinan, dari Dirut Icon Plus hadir *nggak*, Pak Ari ya.

DIRUT PT PLN (PERSERO):

Hadir Bu.

Kemudian juga kami melakukan digital *solution* bagi publik, ini ada *network connection* menuju digital *solution*. Dengan adanya *work from home*, kemudian adanya Covid memang digital *solution* ini menjadi sangat penting. Kemudian juga ada bagaimana kami menyediakan internet *fix broadband* ini *wi-fi*, kemudian juga kami mampu membangun ekosistem digital sebagai pendapatan baru dan meningkatkan *value creason*.

Jadi dari adanya *holding sub-holding* ini memang kita melihat ada beberapa hal, pertama kami berhasil melakukan satu transformasi bisnis kami melalui digitalisasi, baik itu pembangkit, transmisi, distribusi, sistem pengadaan, pelayanan pelanggan, sistem perencanaan, sistem keuangan dan dari transformasi melalui digitalisasi ini sudah berbuah manis pelayanan pelanggan kami jauh lebih cepat, lebih responsif dibanding pelayanan pelanggan 3 tahun lalu.

Sistem keuangan PLN jauh lebih efektif, efisien, kemudian kondisi keuangan PLN juga jauh sehat, sistem kelistrikan bisnis di seantero Nusantara juga menjadi lebih kokoh lagi. Kemudian ini diteruskan dengan transformasi organisasi melalui *holding sub-holding*, di mana dalam hal ini PLN akan menjadi tadinya statis menjadi dinamis, yang tadinya *backward looking* menjadi *forward looking*.



Kemudian juga untuk kondisi bagaimana kelistrikan di tahun 2022, kami bisa melaporkan bahwa dengan *effort* yang luar biasa dan juga pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih sehat, dengan investasi yang juga mengalir cukup deras. Maka penjualan listrik di tahun 2022 yang tadinya diprediksi hanya tumbuh 4,5% ternyata bisa tumbuh menjadi 6,17%.

Demikian pula dengan pendapatan kami juga tumbuh secara sehat. Kemudian ini bisa kami laporkan penyambungan pelanggan baru tumbuh sekitar 3 juta tambahan pelanggan baru. Kemudian juga kita melihat bahwa kalau ini laporan keuangan kami masih belum di audit, jadi kami belum berani melaporkan secara utuh begitu.

F-PKS (Dr. H. MULYANTO, M.Eng.):

Un-audit kan bisa Pak, misalnya keuntungan *un-audit*.

DIRUT PT PLN (PERSERO):

Kami belum punya hak untuk melaporkan itu Pak, nanti kami kesalahan secara *accounting* tetapi kami bisa menyampaikan bahwa kondisi aktivitas sudah pulih seperti sebelum Covid *gitu* Pak dan ini berita menggembirakan, tetapi ini yang kelihatan sekali bahwa pengeluaran *variabel cost* yang di bawah kendalanya PLN itu berhasil dikendalikan, walaupun pertumbuhan *demand*-nya sudah sangat tinggi, sudah cukup sehat, tetapi *cost* itu masih jauh di bawah untuk per item per item-nya, masih jauh di bawah *cost* yang dikeluarkan sebelum Covid-19. Jadi kelihatan sekali pertumbuhan *demand* dan *revenue* kami tumbuh, tapi *cost*-nya terus bisa kami tekan.

Kemudian juga, kami juga melaporkan ini banyak sekali perusahaan *power and utility* kelistrikan di dunia-dunia, di negara tetangga juga banyak yang bertumbangan. Kemudian ini terutama dengan adanya fluktuasi dari harga komoditas, kemudian juga ada kurs rupiah yang cenderung melemah, kemudian dolar yang semakin menguat, kemudian juga tekanan cuaca.

Ini PLN berhasil mengatasi ini semuanya, jadi kalau kita melihat kondisi cuaca, ini cuaca hari ini juga tidak lebih baik daripada dibanding cuaca di tahun 2021, tetapi krisis energi primer yang terjadi di tahun 2021 berhasil kami selesaikan dengan baik. Kemudian di tengah fluktuasi harga komoditas dunia, kami bisa melakukan pengelolaan resiko yang dengan lebih baik lagi.

F-GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):

Interupsi, Pak Ketua.

Jadi di negara-negara tetangga banyak perusahaan listrik yang bangkrut?

DIRUT PT PLN (PERSERO):

Dalam kondisi sulit Bapak.



F-GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):

Sulit, PLN aman *toh?*

DIRUT PT PLN (PERSERO):

Alhamdulillah.

F-GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):

Karena dibantu Komisi VII, pengiriman batubaranya, masuk barang itu.

DIRUT PT PLN (PERSERO):

Terima kasih.

Kami juga menyampaikan Bapak, jadi kami menyampaikan pada waktu kami menghadapi krisis energi primer di tahun 2021, kami melakukan, kami dipanggil oleh Komisi VII. Dan dalam hal itu, waktu itu saya masih ingat, satu, ini kontrak-kontrak kita, kita agak kena itulah, kondisinya tegang kami juga dalam itu agak sedikit kena sentil agak keras juga dari Komisi VII.

Kontrak-kontrak yang jangka pendek, yang ringkih itu menjadi bahan kritikan yang sangat keras dan kemudian kita ubah menjadi kontrak yang jangka panjang yang lebih kokoh lagi *gitu*. Kemudian juga bagaimana sistem *monitoring* yang tadinya juga agak ringkih, kami *monitoring* itu kalau sudah gagal *deliver* Pak, kemudian diubah menjadi sistem *monitoring* pada waktu *loading*.

Kemudian juga pada waktu itu ada Dirjen Minerba di sini dan waktu itu diarahkan agar sistem *monitoring*-nya langsung diintegrasikan dengan sistem *monitoring* di Minerba. Jadi kalau gagal *loading* kemudian langsung ada langkah-langkah yang riil di lapangan, sehingga *loading*-nya akan bisa segera dikoreksi, kemudian juga ada arahan dari Komisi VII mengenai perbaikan dari *policy*-nya.

Sehingga di tengah tekanan cuaca, harga komoditas yang masih tidak terkendali, kami berhasil mengatasi itu dan ini menjadi salah satu pondasi kenapa PLN dan sistem ketenagalistrikan hari ini sangat kokoh.

Untuk itu kami sekali lagi mengucapkan terima kasih atas dukungan *partnership*, kolaborasi antara Komisi VII dengan PLN karena dengan adanya dukungan yang luar biasa dari Komisi VII ini, maka kondisi ketenagalistrikan hari ini kokoh dan aman dan kondisi keuangan PLN juga dalam kondisi yang sehat dan juga aman. Untuk itu sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dari Komisi VII, untuk itu kami mohon arahan, bimbingan dan masukan.



Untuk itu waktu dan tempat kami kembalikan Pak Ketua.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Saya kira arahannya yang bisa saya berikan sekarang Pak, program Komisi VII dibanyakin *gitu* Pak.

Baik, Ibu-Bapak sekalian.

Kita masuk ke tahap pendalaman dan bagi rekan-rekan Komisi VII yang ingin melakukan pendalaman dan menyampaikan pertanyaan, kami persilahkan. Seperti biasa kami mulai dari Fraksi PDI Perjuangan, silakan, pas dulu ya PDI Perjuangan Perjuangan, baik.

Berikut Partai Golkar, silakan. Silakan Bu Roro.

F-GOLKAR (DYAH RORO ESTI WIDYA PUTRI., B.A., M.Sc.):

Terima kasih, Ketua.

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua.*

Yang saya hormati Pimpinan, Anggota Komisi VII dan juga Pak Dirut PLN Pak Darmo beserta seluruh jajaran yang turut kami banggakan.

Yang pertama, tentunya terima kasih atas paparan yang telah disampaikan, tadi kita melihat baik dari sisi progres, baik dari sisi *grand planning* ke depannya, lalu kemudian bagaimana PLN akan bertransformasi ya untuk betul-betul mencapai target *net-zero emission*. Itu sangat amat penting buat kami karena kita juga dalam proses untuk mengawal undang-undangnya ya yang berkaitan mengenai energi baru dan energi terbarukan.

Jadi yang pertama, saya sangat tertarik dengan apa yang disampaikan tadi di beberapa *slide*, salah satunya *slide* 4 mengenai *over supply*. Jadi terkhusus mengenai *over supply* ini karena kemarin ini agak *fresh tuh* Pak Dirut, saya baru aja datang dari dapil saya di Gresik dan waktu itu kunjungan, kebetulan mendampingi Pak Menko Perekonomian beserta Menteri Perindustrian juga, kami berkunjung ke JIPE yang apa *Java Integrated Industrial and Port Estate* di Gresik.

Meninjau waktu itu progres daripada PT Freeport, PT Freeport pembangunan *smelter*-nya yang saat ini mencapai 51,7% dan kita melihat bahwasanya salah satu solusi terhadap *over supply* saat ini kita alami,



terkhusus di wilayah Jawa *gitu* ya, itu adalah daya serap yang dimiliki oleh Kawasan Industri. Jadi di JIPE ini kita sempat, bukan hanya melihat riil-nya ya tetapi melihat bahwasanya ada peluang yang sangat amat besar untuk penyerapan listriknya.

Nah maka kami diberi tahu juga bahwasanya di sana ada pembangunan gardu induk PLN, itu ada beberapa diantaranya ada 3 pembangkit yang dalam proses dibangun atau sudah jadi, saya *I need some reference* mengenai itu, tapi ada 3, ada PLTG 15 megawatt, PLTG lagi 500 megawatt dan juga PLTB 660 megawatt.

Yang ingin saya sampaikan pada forum hari ini adalah saya mohon sekali karena ini berkaitan mengenai bukan hanya daerah pemilihan, tapi juga *multiflier effect* yang didapat dari industri *gitu* ya. Bahwasanya agar dikawal, agar dikawal dengan target pembangunan *smelter* ini rampung di tahun 2024 Pak Dirut.

Jadi saya mohon sekali agar ketika *smelter* sudah siap beroperasi, listriknya siap *gitu* untuk digunakan dan ini potensi yang sangat amat luar biasa dan mudah-mudahan tidak terjadi kalanya di mana ketika *smelter* sudah siap, tapi listriknya *nggak* ada *gitu*. Tapi saya yakin *Insy* Allah mudah-mudahan bisa betul-betul dikawal dengan baik. Itu yang berkaitan mengenai *over supply* dan juga di wilayah kabupaten Gresik.

Di samping itu kita apresiasi, sangat apresiasi dan saya baca belakangan ini bahwasanya PLN berhasil mencatat penjualan terbaik pada tahun 2022 dan ini berkaitan dengan apa sebesar 270,82 terawatt *hour* ya, dengan total 85,28 juta pelanggan. Jadi ini secara keseluruhan tentu kita apresiasi segala bentuk upaya karena kita menyadari bahwa ini sesuatu hal yang tidak gampang ya.

Jadi listrik itu kalau misalnya nyala kita lupa sebetulnya, tapi ketika ada gangguan biasanya kita langsung mendengar komplain dan lain sebagainya, jadi ini patut untuk kita apresiasi. Dari segi penyerapan listriknya sendiri, saya ingin mengetahui itu didominasi oleh apa, apakah industri atau apakah pelanggan pribadi *gitu*, itu kita ingin tahu sektor rumah tangga atau sektor industri agar kedepannya kita juga bisa.

Makanya kenapa saya kepingin sekali nanti ada rapat khusus juga dengan kementerian atau Menteri Perindustrian karena banyak sekali wilayah kawasan ekonomi khusus yang bukan hanya berada di wilayah Gresik atau di Jawa Timur, ada di beberapa wilayah lainnya. Di mana bisa menjadi potensi untuk penyerapan listrik secara keseluruhan, jadi ini mudah-mudahan ke depannya kita bisa ada semacam *brainstorming* juga dengan Menteri Perindustrian untuk *mapping* *gitu*, wilayah mana saja yang bisa kita optimalkan itu.

Lalu kemudian yang terakhir, ini berkaitan karena ini agak rame ya, agak rame dibicarakan dan berkaitan mengenai wilayah Jawa Timur, bukan daerah pemilihan saya tapi di sebelah ya, di Madura. Itu saya dengar bahwasanya ada



gangguan pasokan listrik di wilayah itu dan diperkirakan membutuhkan sekitar 10 hari untuk diperbaiki dan ini mempengaruhi 342.000 pelanggan atau sekitar 32% total pelanggan di Pulau Madura.

Nah maka oleh karena itu ada beberapa upaya yang saya sudah ketahui mengenai apa saja yang sedang dilakukan, termasuk 99 genset yang digunakan untuk mensuplai listrik buat wilayah-wilayah yang agak *urgent gitu*, kayak rumah sakit, polisi, Kodim dan lain-lain *gitu*. Itu udah mendapatkan bantuan, tapi saya ingin mengetahui masalah intinya dari kejadian itu *tuh* apa *gitu* dan bagaimana PLN hadir untuk membantu masyarakat yang selama ini terdampak karena tentunya dari segi ekonominya juga terhambat *gitu* ya, lalu kemudian produktivitas.

Nah hal-hal seperti ini yang harus kita siasati bersama karena sebagai wakil rakyat kita juga, yang kita dengarkan dari masyarakat ya jadi baik itu komplain dari masyarakat, atau aspirasi dari masyarakat ya saya melakukan tugas saya sebagai Anggota DPR untuk menyampaikan agar masalah tersebut dapat terselesaikan dengan baik.

Sekian dari saya, terima kasih Pimpinan.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Wa'alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Ibu Dyah Roro Esti.

Berikut Fraksi Partai Gerindra, Pak Doktor Ramson silakan Pak.

F-GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):

Terima kasih Pak Ketua.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semuanya.

Pak Ketua dan rekan-rekan Anggota yang terhormat,
Pak Dirut dan jajaran yang hormati.

Terima kasih ini pemaparannya cukup bagus menunjukkan prestasi, cuman saya tadi sedikit agak terlambat. Anak perusahaannya dirut-dirutnya yang mana aja Pak? Kalau boleh.

DIRUT PT PLN (PERSERO):

Mohon izin Pak, kami diperkenalkan kembali.



KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Silakan Pak.

DIRUT PT PLN (PERSERO):

Jadi untuk dari ujung sana adalah Pak Edwin Nugraha adalah Dirut PLN Indonesia Power Pak, 23 gigawatt Pak kapasitas yang dikelola. Kemudian Pak Ruly adalah Dirut Nusantara Power 21 gigawatt Pak, kemudian di sebelah kanan adalah Dirut PLN Energi Primer Indonesia itu pengelolaan batubara, gas dengan BBM dalam satu anak perusahaan Pak, Pak Iwan Agung. Kemudian untuk PLN Icon Plus adalah Pak Ari Rahmat di sebelah paling kanan.

Terima kasih, Pak.

F-GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):

Terima kasih, Pak Dirut.

Tadi udah lengkap semua, tapi saya merespons apa yang disampaikan oleh Pak Ketua Rapat, Pak Wakil Ketua soal program sosial. Komisi VII sudah berupaya memperjuangkan agar PLN tetap *survive*, apalagi antara lain kebijakan DMO tapi tadi karena ini tahun 2023 Pak Dirut, ini tahun lebih sering kami-kami ini komunikasi dengan rakyat.

Kira-kira kalau ada program-program yang bisa dilakukan di daerah-daerah, memang untuk penyambungan listrik baru itu tidak semua tempat. Di dapil saya kebetulan saya cek-cek, tim saya mengecek sudah terpasang semua. Jadi bisa saja seperti sosialisasi itu sangat efektif untuk komunikasi apa yang perlu dijelaskan mengenai PLN ke masyarakat.

Jadi misalnya narasumbernya dari PLN bersama dari DPR RI untuk sekian banyak orang, tentunya rakyat yang datang naik motor atau naik kendaraan umum perlu transpornya, terus rakyatnya yang hadir perlu konsumsi juga. Yang seperti itu untuk menambah pengetahuan praktis rakyat itu, ini saya pikir tahun ini itu agak bagus programnya kalau bisa, sepanjang tidak bertentangan dengan sistem anggaran, saya pikir bisa diatur.

Kalau CSR-kan sekarang disatukan di Kementerian BUMN jadi agak lambat, kalau dulu periode kemarin itu langsung bisa BUMN mitra kita untuk mempercepat melakukan merealisasikan CSR, misalnya tahun-tahun seperti ini.

Kalau sekarang kan semua udah dikendalikan oleh pemegang saham, saya juga tidak mau direksi berbenturan dengan pemegang saham karena sekali tanda tangan juga direksi bisa berganti tanda tangan pemegang saham. Jadi saya juga harus paham, harus realistis makanya kalau bisa ditemukan formula yang bisa direalisasikan di daerah-daerah.



Kebetulan di daerah saya kan sudah tidak perlu lagi sambungan baru, ini tolong didiskusikan Pak Dirut, mungkin ada stafnya yang ahli soal itu sehingga dari sisi regulasi aman, tetapi efektif untuk menambah pengetahuan praktis masyarakat, apalagi terkait dengan listrik.

Jadi itu aja yang mau saya sampaikan Pak Dirut karena kalau saya lihat di sini sudah cukup lengkap, sementara tidak perlu yang harus ada saya kritisi dan juga saya lihat PLN sudah proaktif terhadap program pemerintah mengenai transisi energi.

Sehingga saya juga menyampaikan ke pemerintah supaya pemerintah juga realistis, artinya jangan terlalu mudah mau men-*delete* semua PLTU, semua itu memerlukan waktu proses waktunya, tapi saya lihat tahapan-tahapan yang dilakukan PLN sudah cukup bagus. Itu aja Pak Dirut.

Terima kasih Pak Ketua.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Pak Ramson.

Berikut kami lanjutkan dengan Fraksi Partai Nasdem, Pak Arkanata silakan.

F-NASDEM (ARKANATA AKRAM, S.T., B.E. (Hons) M.Eng.Sc.):

Ya.Terima kasih, Pimpinan.

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua.*

Yang terhormat Pimpinan beserta Anggota Komisi VII DPR RI yang saya banggakan, kemudian yang terhormat Bapak Dirut PLN, Bapak Darmawan serta para Direksi PLN maupun direktur dari sub-*holding* sub-*holding* PLN.

Pertama-tama, saya ingin mengapresiasi atas perubahan-perubahan yang sudah dilakukan oleh PLN *holding* untuk atas segala permasalahan-permasalahan yang sudah terjadi sebelum-sebelumnya. Dan juga terkait dengan transfor, transformasi-transformasi di tingkat organisasi yang saya kira ini sejalan dengan Perpres Nomor 112 Tahun 2022, terkait dengan transisi energi yang di situ esensinya adalah mengenai percepatan penggunaan energi terbarukan untuk penggunaan tenaga listrik.



Saya kira di sini ada beberapa poin, 3 poin yang ingin saya sampaikan Pak Dirut. Yang pertama mengenai masukan dan juga mungkin bisa, kalau misalnya izin interaktif sedikit Pimpinan. Ini kan tadi Pak Dirut menyampaikan ada beberapa sub-*holding* yang sudah berkontribusi terhadap tenaga listrik Indonesia yang cukup banyak.

Tadi ada yang 23 gigawatt ya kalau tidak salah dari Indonesia Power dan juga ada 21 gigawatt, ini kira-kira terkait dengan proses untuk mencapai NDC dan NZT itu tadi, apakah PLN memiliki *insight* mengenai beberapa banyak karbon atau gas efek rumah kaca yang sudah diproduksi. Apakah ada datanya Pak Dirut PLN?

DIRUT PT PLN (PERSERO):

Ada Bapak, mohon izin interaktif Bapak Pimpinan.

Jadi sesuai dengan NDC yang sudah *commit*, yang tadinya itu kami harus menurunkan sebesar 38 juta metrik ton *by 2023* Pak. Dari upaya yang kita lakukan saat ini, kami akan *deliver* akan jauh di bawah ekspektasi dari NDC Pak yaitu 110 juta metrik ton.

Tentu saja kami siap untuk menambah NDC-nya kalau ada bantuan luar negeri, misalnya ada penambahan aset-aset bisa ada *grand* yang kemudian digantikan dengan aset yang jauh lebih efisien tapi *grand* Pak, bukan dari penambahan biaya dari pemerintah atau dari PLN. *Nah* untuk itu dari NBC saat ini sudah otomatis akan tercapai di tahun 2030 bahkan di atas ekspektasi.

Nah, kemudian saat ini emisi sistem ketenagalistrikan 280 juta metrik ton tahun kemarin, kemudian kalau *business as usual* di tahun 2060 akan meningkat menjadi 1 miliar ton sekitar itu Pak. Jadi kalau *business as usual*, tetapi dengan adanya *net-zero emission* secara bertahap kami tentu saja *commit* pada tahun 2060 emisinya akan mendekati nol. Tentu saja ini *net-zero emission* masih positif, tetapi nanti ada bagaimana kita melakukan juga *sequestration* sehingga nanti totalnya adalah nol.

Demikian Pak, terima kasih.

F-NASDEM (ARKANATA AKRAM, S.T., B.E. (Hons) M.Eng.Sc.):

Terima kasih Pak Dirut.

Saya kira ini juga sangat dibutuhkan memang menjadi catatan, supaya mungkin lain kali disampaikan saja Pak di RDP karena kan kita tidak hanya membutuhkan mengenai penyampaian dari rencana strategis, tapi *insight and foresight* itu juga perlu disampaikan. Tapi ini menjadi apresiasi lagi bahwa PLN ternyata juga sudah mulai berhasil untuk melebihi NDC itu tadi.

Kemudian yang poin kedua yang ingin kami sampaikan adalah terkait dengan aspirasi kami di Kalimantan Utara, kebetulan dapil kami. Terkait dengan program BPBL, mengingatkan bahwa sebenarnya masyarakat di



Kalimantan Utara itu kan masyarakat yang banyak daerahnya 3t, ditambah lagi juga dengan program BPBL itukan persyaratannya memberikan dari Kementerian ESDM, lebih tepatnya lagi Permen ESDM Nomor 3 Tahun 2022 Pasal 3, di situ persyaratan-persyaratan untuk pihak masyarakat mendapatkan BPBL disampaikan.

Akan tetapi Pak Dirut mengingat bahwa di *slide* 15, di sini sebenarnya sudah disampaikan adanya perubahan penting bahwa organisasi PLN saat ini menjadi *streamline*, lincah, dinamis, *forward looking*. Saya kira ini harus sampai ke lapangan Pak Dirut karena saya mendapati beberapa waktu yang lalu ketika kami kunjungan ke lapangan langsung untuk melihat masyarakat yang terbantuan atau belum terbantuan BPBL ini banyak laporan bahwa anggota-anggota Bapak, petugas-petugas PLN yang mensurvei lapangan itu takut kena lumpur Pak sepatunya.

Padahal di sekitar situ sudah ada jaringan listrik dan masyarakatnya sudah memenuhi persyaratannya, katanya lebih dari 50 meter Pak padahal itu cuma 51 meter. Kan kami di sini orang teknis Pak, artinya akurasi itu ditentukan oleh presentase kurang lebihnya, harusnya jangan 50 meter patokan Pak, harusnya 50 meter plus-minus 10% dari 50 meter, setidaknya 5 meter aja Pak, 55 meter harusnya boleh lah Pak itu disambungin listrik, *nah* itu Pak.

Saya ingin mengapresiasi Pak sebenarnya BPBL itu sangat dibutuhkan bagi masyarakat kami di sana karena masyarakat di 3t ini tidak hanya mereka kesulitan untuk mendapatkan listrik, tetapi memang banyak juga yang masuk ke dalam status data DTKS itu sendiri.

Kemudian izin Pimpinan dan rekan-rekan, terkait poin nomor 3 ini sebenarnya aspirasinya sama Pak dengan aspirasi nomor 2 tadi Pak Dirut, yaitu sebenarnya ini aspirasi yang tertunda. Saya ingin menyampaikan aspirasi ini ke Pak Dirut lewat telepon sebenarnya, saya sampaikan saja secara langsung katanya PLN menjadi lebih *lean*, katanya tadi PLN dengan banyaknya Jargon *manajemen strategis* yang saya kira bagus juga disampaikan ini lebih terbuka, tetapi ini sebenarnya aspirasi yang saya ingin sampaikan ke Pak Dirut langsung 2 bulan yang lalu, tetapi masih belum ada dapat jawaban dari Pak Dirut sampai hari ini. Jadi ya mau *nggak* mau saya hanya bisa menyampaikan ke Pak Dirut terkait aspirasi nomor 2 itu pada hari ini.

Saya kira tolong lah Pak ini Pak benar-benar dibuktikan, PLN ini benar-benar *lean*, PLN ini benar-benar lincah, tidak hanya organisasi di pusat, tidak hanya secara korporat tetapi juga secara ke lapangan dan juga secara ke masyarakatnya langsung karena mengingat kita juga sudah di DPR ini kami juga sudah memasukkan ke dalam Prolegnas terkait RUU EBET dan ini menjadi sangat penting, kalau misalnya PLN sendiri kalau ingin benar-benar memiliki *survivabilitas* dalam jangka panjang, maka PLN harusnya lebih mau lah memperluas jaringan dan memperluas, memperbanyak pelanggannya sendiri.

Mungkin itu saja dari kami Pimpinan, kurang lebihnya mohon maaf.

Wabillahittaufig wal hidayah,



F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Izin Pimpinan

F-NASDEM (ARKANATA AKRAM, S.T., B.E. (Hons) M.Eng.Sc.):

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Itu harus pakai tangan besi Pak Dirut, diganti hari ini orang yang kayak *gitu*, itu baru bener dirutnya, inikan udah malu di publik di bilang gini, katanya kokoh tapi kayak gini kan, rapuh dia padahal.

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Lanjut dari Fraksi PKB, Pak Karding silakan.

F-PKB (H. ABDUL KADIR KARDING, S.Pi, M.Si):

Pak Menteri, ada Pak Menteri di sana jadi.

Baik, terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat siang,
Salam sejahtera.

Pimpinan dan sahabat-sahabat untuk teman-teman Anggota Komisi VII, Pak Dirut serta seluruh jajaran.

Yang pertama saya kira saya sampai hari ini masih agak banyak bertanya, saya ingin dapat penjelasan agak lebih terutama soal *over supply*. Jadi saya minta nanti penjelasan secara agak detail supaya kita bisa ikut mendorong upaya penyelesaiannya, karena kan uang negara yang terus sia-sia dibayarkan dan dalam konteks sia-sia karena tidak dipakai, itu menjadi beban di pikiran saya.

Jadi langkah-langkah yang solutif dan efektif itu menurut saya butuh kita bicarakan bersama apa, bukan hal, kalau langkah-langkah yang parsial saya kira sudah mulai dicoba ya tapi apa yang jitu ya untuk menyelesaikan soal *over supply* ini dan titik-titik *over supply*-nya mungkin juga perlu dijelaskan, walaupun dulu udah pernah ya, tapi maksudnya ini harus karena ini 2023, maka kita harus tahu posisi hari ini seperti apa.

Lalu *roadmap* untuk solusinya itu seperti apa, ini yang penting untuk mendapatkan penjelasan karena ini juga terkait dengan banyak *stakeholder*



atau institusi lainnya, jadi menurut saya harus kita bicarakan agak serius, itu yang pertama.

Yang kedua saya membaca *paper* yang ada di depan saya ini, nampaknya kalau menurut *paper* ini nampaknya PLN sudah jauh lebih maju dari perkiraan saya ya, dari bayangan saya. Mulai dari pasokan sampai pada sistem digitalisasi yang sudah dikembangkan dan juga pelayanan, bahkan sampai detailnya juga sudah cukup bagus.

Saya mungkin butuh elaborasi lebih detail fakta-fakta lapangan aja biar apa namanya, biar apa namanya, biar kita tahu persis itu terjadi. Maksudnya dia tidak hanya di *paper* ini, kemarin saya juga ngomong yang sama-sama MIND-ID. Saya bilang jangan sampai Pak Jokowi selaku presiden tiap hari berbasa mulutnya bicara soal hilirisasi tapi pasukan di bawahnya itu *nggak* ada yang jalan, jadi cuma jargon dan verbalisme politik.

Nah itu kita *nggak* ingin itu, maksudnya saya juga ingin fakta lapangan bahwa transformasi modernitas kemajuan yang dicapai oleh PLN ini di tingkat lapangan betul-betul sudah tergambar. Misalnya ya seperti digitalisasi pembangkit dan sebagainya, sudah berapa persen, sudah di mana dan sebagainya seperti apa, supaya kita sebagai mitra ini ditanya publik itu bisa ikut menjawab. Jangan nanti misalnya yang bisa jawab hanya Pak Dirut aja, kami *nggak* bisa, ini kan bukan mitra yang baik. Itu yang kedua.

Yang ketiga, saya mendorong dan sekaligus lihat bahwa kita semua sekarang *concern* pada mengawal transisi energi baru terbarukan, energi baru terbarukan. Termasuk saya juga termasuk salah satu poinnya adalah RUU tentang EBET, RUU tentang Energi Baru Terbarukan itu banyak, banyak hal di dalam yang saya kira akan ke depan menjadi kendaraan untuk mendorong upaya kita untuk melakukan transisi energi.

PLN saya lihat sudah berusaha mendorong itu, walaupun juga apa namanya ini agak ribet ya karena banyak faktor yang terkait. Tetapi saya ingin gambaran lebih nyata, langkah-langkah riil konkret PLN dalam konteks ini apa saja, apa saja soal energi baru terbarukan ini.

Yang kedua, saya ingin nanya Pak Dirut, Pak Luhut itu pernah menyatakan bahwa dalam konteks G20 lah, energi barulah, kemudian ada kebijakan subsidi untuk motor listrik dan mobil listrik. Kalau *nggak* salah motor listrik 7 juta, kalau mobil listrik 80 juta, nah Pak Dirut setuju *nggak* dengan, dengan kebijakan ini atau jangan-jangan misalnya PLN yang mendorong ini ke Pak Luhut.

Kalau menurut saya pribadi ya, kebijakan ini sekali lagi kebijakan yang semangatnya bagus tapi faktanya lalu merusak banyak hal. Kenapa saya bilang gini? Apakah dengan subsidi yang cukup banyak ini, ini banyak *loh* karena subsidi inikan subsidi terbuka, mau siapa saja yang beli motor dan mobil kena subsidi dan terbuka gitu *kan* istilahnya.

Jadi *nggak* ada miskin, *nggak* ada kurang mampu, *nggak* ada kaya-miskin, mampu tidak mampu semua dapat subsidi. Artinya apa? Mobil di Jakarta, ini kita ambil Jakarta aja itu akan bertambah, macetnya bertambah, asapnya juga tetap karena tidak, karena dengan beli mobil baru tidak mengurangi mobil lama, karena bukan konversi.

Sudah uang negara begitu banyak terbuang, kalau 80 juta itu kalau orang beli orang Indonesia beli satu juta mobil aja udah berapa rupiah *tuh* kalau dikali. Jadi mobilnya tambah banyak, tambah macet karena bukan konversi atau bukan, tidak dapat konversi lah ya, bukan penggantian, maka asapnya juga tetap aja, emisinya tetap.

Nah menurut saya harusnya ada yang memberi masukan ke pemerintah bahwa itu bukan langkah yang jitu atau solutif. *Nah* saya *nggak* tahu di belakang ini apakah ada yang sudah punya proyek kendaraan kerjasama dengan, ini dugaan aja ya karena di mana-mana semua kebijakan itu pasti ada *under-under*-nya, ada ujungnya, ujungnya itu biasanya menguntungkan pada pihak-pihak tertentu atau kelompok tertentu. Apakah itu ada tapi terlepas dari itu saya bilang kebijakan ini kebijakan yang sangat terburu-buru dan tidak menarik.

Jadi ada 3 poin itu Pak Dirut yang saya mohon tanggapannya dan kalau soal yang lain nanti aja saya kira. Saya kira sudah disampaikan teman-teman sekalian.

Terima kasih Pimpinan, mohon maaf.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Berikutnya Fraksi Partai Demokrat, kami persilakan Pak Nasir.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Terima kasih.

Assalammu'alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh,

Yang terhormat Pimpinan, teman-teman Anggota Komisi VII, Saudara Dirut dan seluruh jajarannya.

Paparan yang disampaikan Pak Dirut tadi bagi manajemen PLN sangat baik, tapi kami mendapatkan beberapa temuan dan temuan ini mungkin Pak Dirut ketahui atau tidak tapi kondisinya tentang perkembangan jaringan yang dilakukan paparannya tadi, menurut kami perlu penjelasan lebih detail Pak



Dirut. Mohonnya kalau mengirimkan bahan detilnya itu dijelaskan di sini gitu, lampirannya ada dan regulasinya kita bisa jelas *gitu*.

Nah terus struktural yang disusun oleh PLN sekarang, saya khawatir 2 anak perusahaan ini *nggak* mampu untuk mengelola pembangkit-pembangkit dan sistem yang ada selama ini di sektor pusat. *Nah* *nggak* mampunya saya mendapatkan beberapa aktivitas di, ini PLN apa tadi yang Indonesia Power, PJB mana.

DIRUT PT PLN (PERSERO):

PJB adalah Nusantara Power.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Oh diganti ya dirubah.

DIRUT PT PLN (PERSERO):

Kebetulan dunia internasional kesulitan pembangkitan Jawa-Bali agak kesulitan, sedangkan yang terkenal hanya Indonesia Power, Pak. Akhirnya kita ubah menggunakan Nusantara Power.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Tapi isinya orangnya itu juga?

DIRUT PT PLN (PERSERO):

Sam,a Pak.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Berarti *otake podo wae gitu*.

Pak, di situ ada pembangkit yang sudah jalan yang mungkin udah berapa tahun dan dalam perawatan regulasi di PJB juga sebelumnya, maupun di Indonesia Power. *Nah* kami melihat ada beberapa kejanggalan di sana, termasuk transmisi. *Nah* transmisi ini saya pingin detailkan saja Pak, berapa regulasi pemasangan transmisi per meternya, apa saja itemnya.

Saya pernah mendapatkan ada *mark-up* yang cukup besar hampir 1 triliun di transmisi Sumatera, *nah* jadi kalau saya minta *sih* pendalamannya lebih serius *gitu*. *Nah* itu waktu itu GM nya siapa ya saya lupa *tuh*, aduh waktu jaman Pak *Sofyan Baasir* lari ke Pak Zul itu, *nah* itu ketemu ada *mark-up* yang meningkat dari 1,8 triliun menjadi 1,3 triliun menjadi 2 hampir 2 sekian triliun, alasannya penambahan tenaga kerja.

Nah saya minta itu coba dibawa *dong* datanya ke sini, jadi transmisinya harus jelas berapa *sih* volume yang dibuat berapa besar, berapa angkanya.



Makanya tadi saya minta Direksi Mega Proyeknya, pasti yang konsep ini dari dari hulu sampai ke hilir pasti akhirnya ke situ *gitu*.

Jadi saya minta direksi-direksi yang baru ini juga harus paparan, apa *sih* tugas dan fungsinya, supaya kita *clear* Pak Dirut. Kalau Pak Dirut kan tadi manajemennya udah keren ini, tapi kalau bawahnya *nyabet-nyabet nggak* jelas kan susah nanti.

Jadi PLN ini terkenal korupsinya Pak, jadi korupsinya ini yang harus dibongkar. Ada satu itu pembangkit di Belawan itu apa namanya, saya *nggak* tahu, apa namanya itu Pak Dirut yang di Belawan pembangkit PLN ini, bukan yang punya PLN bukan yang punya Turki, iya apa itu, Canang ya apa, iya apa namanya itu, Belawan ya yang pembangkitnya yang sering dioper apa.

Coba itu Pak Dirut, saya minta datanya, saya dengar itu harganya di *up* 3 kali dan Kajati Sumatera Utara itu *nggak* berani *gitu* karena kerjasama kayaknya. Jadi saya minta panja itu nanti datengin tempat itu, *nah* kami minta semua regulasinya dijelaskan di situ. Pelakunya harus ditangkap di situ, biar *clear*, ini kan dibawah kepemimpinan Pak Dirut, saya dukung Pak Dirut ini, supaya keren Pak Dirut ini, jadi paparannya lengkap semua *nah gitu*.

Jadi harus satu dan saya minta di 2 perusahaan ini juga harus menjelaskan semua regulasi yang mau dijalankan biar *clear gitu*. Ini satu yang Indonesia Power ya PJB lah dulu saya ngomongnya, PJB Nusantara Power. Iya Nusantara Power karena saya dulu ingat dirutnya PJB ini pernah diperiksa KPK gara-gara masalah apa itu Pak, Bapak *sampeyan* diperiksa, bener *kan* Pak Dirut *gitu*, jadi dulu dia Dirutnya PJB. Jadi harus dijelaskan dulu, ini paparan Pak Dirut *kan* udah keren, tadi udah bagus.

Nah jadi cuman kami juga nanti harus melototin Direktur Keuangan Bapak, berapa regulasi pengeluaran pembiayaan termasuk Direktur Keuangan masing-masing, supaya *clear*. Ini *kan* PLN ini ya enak *sih* perusahaan yang paling enak tidak ada kompetitornya, tapi ceritanya *nggak* pernah *profit*-nya yang memuaskan *gitu*.

Nah saya punya teman yang punya pembangkit, dia bilang untung *sih* Bang, nyaman kami *gitu*. Dia punya pembangkit untuk pemakaian industrinya sendiri, maka kelebihan arusnya dilepas oleh PLN *gitu*, berarti kan profitnya 2 kali.

Saya pernah menyarankan kepada Pak Dirut bahwa surplus kelebihan arus PLN ini mungkin marketingnya Pak yang PLN ini kurang *gitu*, cuma mutus nyabut, mutus masang, itu aja *marketing* yang ada di PLN. Tapi kelebihan arus ini Bapak *nggak* punya *marketing*-nya, datengin perusahaan-perusahaan yang mungkin dia bisa lemburkan anggotanya malam, bisa makai arus PLN, mungkin dikasih diskon.

Ini Bapak yang *nggak* punya *gitu*, yang punya cuma mutus masang, mutus masang, mintain duit sama masyarakat *gitu* aja, tapi *nggak* sampai ke dirut laporannya *gitu*. Jadi saya ingin itu aja Pak, jadi saya minta tolong di dalam



jawaban nanti ini saya sudah tahu seluruh kegiatan yang ada di Canang tadi, saya minta disampaikan di sini dan nilai proyeknya dan siapa kontraktor yang melakukan pekerjaan itu.

Dan saya minta Kajati Sumatera Utara harus menangkap orang itu. Saya juga akan surati Komisi III untuk menggelar kasus ini, supaya tuntas permasalahannya *gitu*, jangan dibiarkan lagi Pak Dirut. Termasuk *mark-up* jaringan yang menembus angka 1 triliun tadi, termasuk mungkin di daerah lain *nah* tapi di jaman Pak Dirut, saya minta ini harus *clear gitu*.

Jadi jangan ada lagi yang masalah seperti ini, *gitu* karena konsepnya kan tadi udah apa namanya? Udah digital, tapi orang kampung jangan dipaksa digital Pak, nanti agak mumet dia, agak bingung. Jadi mungkin perlu sosialisasi dulu seperti yang disampaikan teman saya tadi Pak Ramson bagus, *nah* teman-teman DPR nanti bisa mendampingi, bagaimana sistem digital ini *gitu*.

Jadi mungkin yang paling penting tadi Pak, korupsi yang ada di PLN ini Bapak harus jelaskan, bersihkan dulu, baru PLN ini kokoh dan kuat. *Nah* jangan nanti, nanti ada *pat pet pat pet* lagi, ada baru-baru ini satu, salah satu provinsi tiba-tiba *pet* mati berapa jam, *nah* agak puyeng juga *gitu*, tapi saya *nggak* sebut tempatnya lah nanti tambah rame lagi di rapat ini.

Jadi mungkin itu Pak, saya minta termasuk tadi yang kasus Riau, jadi boleh aja membangun pembangkit silakan, pengawasan regulasi karena perawatan ini *kan* gengsinya lumayan *gitu*, *nah* jadi seksi lah dia, *nah gitu*. Jadi saya minta 2 perusahaan ini harus menjelaskan dulu, berapa pembangkit yang ditangani masing-masing, *nah* di mana saja lokasinya, *nah* kami minta daftarnya, *nah* regulasinya seperti apa *gitu*, jadi atau sebelumnya juga sebelum digabung seluruhnya berapa yang ditangani, yang setelah digabung berapa *gitu nah gitu*. *Nah* terus kami minta nanti rapat di panja kami mengundang Direktur Keuangan Bapak dulu untuk sistem perawatan dan sistem ini.

Dan yang terakhir mungkin kami minta juga seluruh kontrak *multiyears* yang dilakukan PLN untuk perawatan dan perawatan, dan penambahan pemasangan kabel atau pembagian kabel yang kontraknya 5 tahun sekali, ini *nggak* pernah ganti orangnya tolong dijelaskan.

Ini agak aneh *gitu*, jadi orangnya *ndak* pernah berubah-berubah, kerjanya terus berjalan, apa kelebihan orang ini *gitu*. *Nah* karena seluruh masyarakat yang punya aktivitas di sana protes ke kita, ini apa *sih* PLN *kok* begini terus *gitu*. *Nah* itu mungkin Pak yang harus dibenahin Pak Dirut.

Nah tolong datanya sebelum dijawab kami bisa terima, boleh diselesaikan karena datanya tinggal di *print* saja *kok* *nggak* ribet, mungkin bisa di-*share* kepada teman-teman atau dibuat jawaban tertulis ke saya, biar saya biar lebih jelas bagaimana regulasi itu bisa, nanti di dalam panja, saya minta Panja tadi saya tanya Sekretariat masih ada.

Mungkin di panja kita bisa lebih dalamin dan izin Pimpinan, mungkin kita bisa melakukan kunjungan ke Sumatera Utara tadi untuk mengecek langsung



dan semua datanya saya minta disiapkan Pak Dirut karena saya juga akan ngirimin Komisi III untuk melakukan penanganan kasus itu.

Mungkin itu, terima kasih.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Pak Nasir.

Berikut Fraksi PKS Pak Doktor Mulyanto silakan.

F-PKS (Dr. H. MULYANTO, M.Eng.):

Terima kasih Pimpinan yang ganteng dan keren. Dua *nih* ganteng dan keren ada di sini, apel segar semua di sini, kalau yang kita ini udah apel setengah layu, untung belum busuk.

Bapak Dirut, kami bangga presentasinya sangat bagus sekali, dimulai dengan pantun juga. Tadi kami sudah tanyakan status anak perusahaan BUMN atau bukan itu menjadi wacana yang mendorong revisi Undang-Undang BUMN di teman-teman di Komisi VI karena kami Komisi VII dan kami PKS selalu berusaha sekuat tenaga untuk mengokohkan PLN.

Keyakinan kami satu bahwa ketenagalistrikan ini adalah usaha yang penting dan strategis, kalau *nggak* penting dan strategis kami *nggak* mau memikirkan ini karena ini penting dalam strategis, maka dia dikuasai negara. Maka kami akan membela mati-matian PLN ini, jadi itulah kenapa ketika Pakistan seperti itu, Eropa seperti itu dan penyebabnya jelas.

Maka persoalan apa, daya dukung terhadap PLN kami harus kokohkan. Pak Maman itu luar biasa yang membantu BLU untuk mengokohkan DMO, bahkan teman-teman DPR. Terus terang Pak ya teman-teman DPR bahkan memasukkan dalam RUU EBET agar DMO 30% dengan harga di **cap (1.41.14)** 70 US dolar.

Tapi akhirnya pemerintah didalam DIM malah menghapus itu kan, DPR yang memasukkan angka 30% untuk DMO dengan angka tetap 70%. Itu saya tahu persis di Baleg keputusannya begitu. Jadi jangan meragukan lagi perjuangan DPR ini untuk PLN. Makanya saya menegaskan itu tadi, kami menginginkan PLN ini kuat secara legal itu kokoh, jangan sampai ada terkesan usaha yang penting dan strategi ini terjadi proses privatisasi diswastakan kan begitu intinya.

Jangan sampai pembangkit ini 100% swasta, jangan sampai, harus *clear* bahwa sub-*holding* itu adalah BUMN, jadi tetap milik negara. Legalitas



itukan belum jelas sekarang, itu yang kami butuh ketegasan itu walaupun mungkin bukan Pak Dirut yang bisa menjawab itu, pemerintah.

Yang kedua, kami juga menginginkan transmisi ini tidak diprivatisasi, tidak diliberalisasi, tetap masih dalam kewenangan PLN untuk mengelolanya karena sangat penting dan strategis. Tadi sudah dibuat jalur, dibuat jalur transmisi, bahkan melingkar agar kita kondisinya aman, tidak ingin mengulangi kasus sengon, *alhamdulillah* itu *kan* Pak.

Namun di sisi lain teman-teman juga, Pak Maman ada di garda depan menginginkan agar EBET bisa didorong *kan* begitu, agar EBET terdorong. Muncullah gagasan *power willing*, ini debat ini *kan* luar biasa. Akhirnya DIM RUU EBET terlambat sekian bulan kali ya, intinya di *power willing*.

Kami tetap menginginkan sektor kelistrikan ini dikelola oleh PLN, kalau bisa *kan unbundling*, jangan di *bundling* pembangkit semuanya swasta, ini swasta, PLN jadi apa ini operator aja, tidak *kan gitu*, yang terintegrasi dikuasai oleh negara dan PLN lah berperan.

Nah secara filosofis kami masih meyakini bahwa transmisi ini harus dikelola oleh PLN, kalau *power willing* mewajibkan membuka itu, kami menolak. Lalu juga dari segi bisnis Bapak menyatakan *over supply* dengan adanya TOP, kalau *power willing* masuk, kami dipaksa TOP-nya makin apa, surplusnya makin tinggi, minus keuangannya takut tereduksi, tadi *kan* sudah disampaikan ada kebaikan-kebaikan kondisi keuangan sekarang ya.

Lalu juga saya dalam kepada teman-teman teknis di PLN, kalau langsung dibuka, apa transmisi tadi beban jaringan yang tidak kokoh, ini bisa *nggak* stabil. Secara teknis *power willing* ini juga mengganggu, hal itu pemahaman yang kami dapat secara serabutan.

Karenanya dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami ingin secara resmi tegas bagaimana pandangan PLN mengenai wacana *power willing* ini, tidak ada di DIM RUU EBET, tapi mungkin saja dalam perkembangan akan berubah. *Nah* ini peta ini, wacana seperti ini yang harus kita kembangkan sehingga sehat di dalam perumusan legislasi kita.

Demikian Pimpinan, itu nomor satu, ada satu lagi. Satu lagi kami didatangi oleh Serikat Pekerja PLN Indonesia dari Sumatera Barat, Sumatera Selatan yang luar biasanya datang ketua dengan sekretaris, anggotanya datang jauh-jauh dari Sumatera Selatan didampingi pendamping pendampingnya luar biasa.

Pendampingnya lebih dari 10 orang Anggota DPRD provinsi dan bukan hanya dari PKS, saya pikir dari PKS semua ini sepuluhnya, bukan, campur-campur dari berbagai partai. Tuntutannya *insya* Allah akan dibacakan oleh Bapak kita, Bapak Ustadz Nurhasan.

Silakan Pak Ustadz.



F-PKS (NURHASAN ZAIDI, S.Sos.):

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya mohon maaf melanjutkan dari Pak Mulyanto, ini karena ini amanah Pak dari Dewan Pimpinan Nasional Serikat Pekerja PT PLN, jadi harus kami sampaikan dengan rasa cinta untuk kemajuan PLN karena ini yang menyampaikan Serikat Pekerja, pasti Serikat Pekerja ini pengabdianya ya cinta itu dengan *watawasshoubil haq watawasshoubil shobr*, kita saling sabar.

Nah ini saya bacakan ya supaya ini diketahui kita bersama karena yang mendatangi juga didampingi seluruh fraksi dari Provinsi Sumatera, Palembang, Sumatera Selatan.

Untuk itu kami Serikat pekerja PT PLN Indonesia yang bergabung dalam Aliansi Pekerja Publik dan Konsumen Listrik tolak privatisasi PLN, tuntutananya:

1. Tolak kenaikan tarif listrik sesuai tarif pasar;
2. Tolak privatisasi PLN sesuai Putusan MK Nomor 111;
3. Batalkan restrukturisasi pembentukan *holding sub-holding* PLN, yang bertujuan untuk memudahkan privatisasi PLN ke depan;
4. Batalkan legal *state holding sub-holding* PLN;
5. Batalkan pembubaran PLN, pembangkit PLN;
6. Stop penyerahan aset publik yang harus dikuasai negara diserahkan ke swasta atau *sub-holding* senilai 300 triliun;
7. Stop pemaksaan diskriminasi pegawai PLN dengan memutasi pekerjaan dengan program tugas karya;
8. Stop pemberangusan terhadap Serikat Pekerja PT PLN,
9. Stop PHK ilegal Saudara Rudi Setiawan.

Itu tuntutananya Pak, tertanda Ketua Umum Eko Sumantri, Sekretaris Jenderal Haji Amri Nur Muhammad.

Itu saja amanah ini saya sampaikan dan langsung saya serahkan ke Pak Dirut, mudah-mudahan semua ini untuk menguatkan negara kita tercinta.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pimpinan, saya izin menyerahkan Pimpinan.

F-PKS (Dr. H. MULYANTO, M.Eng.):

Demikian dari kami Pimpinan, mudah-mudahan berkah.

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Baik, terima kasih Pak Mul.

Kami lanjut Pak Asman Abnur Fraksi PAN.



F-DEMOKRAT (SARTONO HUTOMO):

Daftar Pimpinan, Sartono Pimpinan.

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Siap, baik.

F-PAN (Dr. H. ASMAN ABNUR, S.E., M.Si.):

Terima kasih Pak Pimpinan.

Izin Bu Andi ya biasanya yang ngomong selalu Bu Andi Pak Dirut, saya dikasih kesempatan.

Pimpinan, teman-teman Komisi VII, Pak Dirut dan tim semuanya CEO *holding-holding* yang sudah dibentuk.

Kemudian Pak Dirut kayaknya udah 1 tahun lebih juga ya jadi dirut, 1 tahun 1 bulan, mungkin nanti tahun depan diukur lagi Pak, apa yang sudah dikerjakan, 1 tahun baru berubah organisasi, baru berbentuk kelembagaan. Saya takut lupa, Bapak lupa nanti kerja lapangan karena membangun organisasi unit-unit kerja ini bukan pekerjaan yang pendek.

Kalau Bapak konsentrasi di sini nanti beda ini keinginan yang Bapak tuangkan dalam bentuk *holding* ini dengan yang dirasakan di lapangan. Saya cuma mengingatkan aja Pak karena membentuk gampang, tapi melaksanakan itu biasanya jauh lebih sulit.

Nah, mudah-mudahan pembentukan badan organisasi yang baru ini tidak menjadi keinginan, tapi harus menjadi kenyataan tapi ini sekali lagi saya mengingatkan kelembagaan baru ini akan menyita banyak waktu Bapak, sehingga nanti takut saya yang diinginkan dengan kenyataannya jauh lebih berbeda.

Tadi saya sebenarnya *nggak* terlalu teknis, tapi hari ini saya mau bicara teknis ke Bapak. Yang Bapak inginkan adalah tidak ada *blackout* tadi salah satu yang sangat menggembirakan, tapi yang dirasakan kebetulan saya tahun baru kemarin Pak, saya di dapil di Batam itu baru saja sorenya deklarasi PLN tanpa *blackout*, malam begitu banyaknya turis yang datang ke Batam, jujur aja semenjak dibuka itu baru kali itu turis teramai dari negara-negara tetangga kita, dari Singapura, Malaysia, kemudian dari India jam 3 malam seluruh sistem PLN yang ada di Batam dan Bintan mati Pak.

Kita nyambut pariwisatanya dengan lampu mati, listrik mati, Bapak bayangkan hotel-hotel baru operasi kemudian baru dapat tamu disambut dengan PLN yang mati sampai 2 hari. Wah ini menyedihkan kalau menurut saya, bertolak belakang dengan keinginan Bapak tadi itu. *Nah* itu satu, ini kenyataan saya *nggak* tahu organisasi yang Bapak bangun ini menyentuh



nggak PLN yang kebetulan katanya di situ berdiri sendiri perusahaan PLN sendiri, kalau *nggak* salah namanya Bright PLN Batam namanya. *Nah* harusnya dengan leluasa cepat penanganannya tapi ini saya lihat belum nyambung dengan keinginan yang Bapak inginkan tadi. Itu yang pertama.

Yang kedua, tadi disampaikan keberhasilan. Saya *nggak* tahu nih ukuran keberhasilannya itu apa, ini unit-unit kerja yang Bapak bangun ini mulai *holding* sub-*holding* ini. Saya khawatir aja Pak, nanti ini menjadi kerajaan kecil baru karena biasanya kalau kita tidak merubah *mindset* dari sebuah *holding* ini, kalau dia berpikiran seperti birokrasi *nah* selesai Pak. *Nah* jangan sampai nanti begitu dia Dirut atau direktur *holding* perilakunya berubah Pak, hanya dengan protokoler. *Nah* saya *nggak* tahu kalau ini yang terjadi, Bapak tinggal nunggu saatnya itu hanya tinggal keinginan Bapak, tapi tidak akan menjadi kenyataan Pak Dirut karena udah 1 tahun lebih Pak, Pak Dirut habis itu *kan* sebelumnya wakil direktur.

Nah maka dari itu konsentrasi saya adalah tolong dikurangi seremonial itu Pak, protokoler yang ada di masing-masing unit organisasi Bapak ini. Nanti kita melihat direksi baru ini *nggak* bisa lagi ngangkat handphonenya sendiri, udah pakai pengawalnya semua. *Nah* mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi sesuatu catatan buat Pak Dirut bahwa kebanyakan kita biasanya kalau sudah punya satu kewenangan itu akan menjadi sesuatu yang menyenangkan.

Nah maka yang harus dibangun adalah budaya kerja yang bersifat korporasi, bukan lagi seperti birokrat karena memang *nggak* ada saingan PLN ini, *nggak* ada saingan beda dengan Singapura Pak, sama Malaysia diciptakan kompetitifnya.

Bahkan yang punya usaha solar energi terbarukan pun sekarang bisa menjual langsung ke customer, akibatnya apa? Ada kompetisi harga, customer tinggal milih alur mana yang dia pakai, mau yang termurah apa yang masih mahal. Saya khawatir ini akan menjadi sesuatu halangan Bapak untuk membangun PLN yang punya budaya baru.

Nah kemudian yang ketiga, saya melihat banyak pembangkit-pembangkit baru dan sudah kontak dengan PLN ternyata waktu dibangun sistemnya, disambungkan sistemnya *nggak* nyambung sama sekali. Akhirnya apa yang diinginkan suplai baru dari pembangkit baru ini tidak terlaksana, *nah* sampai hari ini Pak Batam dan Bintan kebetulan dapil saya di situ, itu masih bergiliran matinya, ini kayak tahun 80-an, masih bergiliran.

Ada jadwal pergiliran matinya listrik, sementara depan kita ada Singapura, ada Malaysia, sekarang ada Vietnam, *nah* saya sebagai Anggota Komisi VII dari dapil situ agak malu juga saya Pak, ini yang terjadi Pak Dirut. Jadi mungkin Pak Dirut ke depan karena sudah didelegasikan semua tugas-tugasnya ini, jangan di belakang meja lagi Pak, maksudnya coba Bapak cek ke lapangan masing-masing satu-satu itu pembangkit. Apa yang disampaikan Saudara Nasir tadi saya yakin itu terjadi, karena selama ini banyak direksi begitu menjabat habis itu lupa pada tugas teknisnya.

Nah maka dari itu saya hanya mengingatkan hari ini kepada Pak Dirut yang masih muda yang baru, saya kan pernah ketemu Bapak kalau kabinet dulu, sekarang udah jadi dirut, syukur. Saya pikir ini momentum Bapak-bapak yang masih muda untuk memperbaiki budaya kerja yang selama ini ada di PLN dengan budaya korporasi, yang baru. *Nah* ini *nggak* gampang tapi 1 tahun ini jangan sampai perubahan organisasi ini tidak melakukan apa-apa, tidak melaksanakan tugasnya.

Kemudian yang terakhir, saya dapat titipan dari Kapoksi saya, Pak. Ini mohon nanti dikirim ke kita secara tertulis daftar perusahaan di lingkaran PLN yang paling tinggi dan tinggi emisinya, supaya kita bisa memberikan pengawasan lebih baik ke depan sesuai dengan target kita yaitu menjadi *green* energi.

Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya buat Pak Dirut, saya hanya mengingatkan bahwa waktu berjalan Pak Dirut udah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun biasanya bisa aja ganti lagi Pak, apalagi habis pemilu Pak, kita *nggak* tahu. *Nah* maka dari itu tolong jangan sampai rugi waktu dan habis menjabat baru ingat jurusnya.

Nah untuk itu saya ingin menyampaikan bahwa ini momentum buat Bapak untuk merubah budaya kerja yang selama ini terjadi di PLN, biasanya budaya kerja ini akan selalu mempengaruhi hasil atau *outcome* yang akan Bapak capai di organisasi yang Bapak bentuk baru itu.

Kemudian itu saja Pak, mudah-mudahan ini menjadi masukan yang baik buat Bapak hari ini.

Terima kasih.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

F-DEMOKRAT (SARTONO HUTOMO):

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Berikut Pak Sartono tadi minta.

F-DEMOKRAT (SARTONO HUTOMO):

Terima kasih Pimpinan, sebentar aja Pimpinan.

Pimpinan yang kami hormati,
Sahabat Komisi VII yang kami hormati dan
Pak Dirut dengan seluruh jajaran, ada Dirut Sub- *Holding* juga yang saya hormati.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,



Setelah sebelum saya berbicara mengenai program strategis PLN tahun 2023, yang tentu tadi saya juga sudah mendengarkan paparan Pak Dirut tentang capaian target-target daripada kinerja PLN di tahun 2022. Tentu kalau yang berhasil ya kita berikan apresiasi lah ya, yang belum tentu agar kita genjot agar realisasi capaian itu bisa terjadi.

Sebelum hal itu, apa kita bicarakan, kami ingin sedikit mendapat penjelasan begitu Pak Dirut. 5 bulan lalu Pak Menteri BUMN, Pak Erick Thohir bersama PLN menyampaikan bahwa utang PLN ini turun dari 500 triliun menjadi 400 triliun.

Nah kami juga ingin mendapatkan informasi, saat ini bagaimana posisi utang PLN itu. Pertama, apakah ada penambahan atukah ada pengurangan dan terkait program PLN 2023 bagaimana pembiayaannya, uangnya dari mana, ini juga perlu Bapak sampaikan begitu secara transparan.

Kemudian juga kita ingin tahu langkah apa yang dilakukan sehingga utang PLN bisa berkurang cukup besar dari 500T menjadi 400T itu, apakah tahun ini ada kemungkinan penghapusan utang itu juga, saya harapkan bahwa perusahaan PLN inikan harus sehat ini di tangan Pak Dirut.

Tadi Pak Menteri Asman menyampaikan bahwa kekuasaan itu sebentar-sebentar saja itu, jabatan itu sebentar-sebentar saja tapi kalau sebentar berarti Bapak bisa efektif, bisa memaksimalkan kinerja, juga tadi ada masukan-masukan untuk evaluasi yang terjadi di lapangan, *nah* ini kami juga bersepakat untuk itu.

PLN harus sehat jangan sampai mendengarkan, dulu waktu saya di periode sebelumnya di Komisi VI, ini PLN ini satu minggu mau kiamat belum selesai tuh urusannya itu, jadi semoga Bapak bisa menjawab itu Pak Dirut ya.

Terus juga tentang pemberian PMN di tahun 2002, kiranya juga kami ingin diberikan informasi lah mengenai pemanfaatan PMN PLN tahun 2002 atau bahkan 5 tahun terakhir ini. Itu apa, beberapa yang ingin saya tanyakan ke Bapak, mungkin ada tambahan sedikit.

Beberapa waktu lalu saya lihat di TV atau di pemberitaan ya tentang *outsourcing* itu Pak Dirut, katanya PLN itu kan rajanya *outsourcing* begitu. Ini juga tolong penjelasan begitu karena begitu banyak praktek-praktik katanya perbudakan modern, *nah* itu gimana itu ceritanya. Masa *sih* di negara Pancasila itu terjadi hal itu, jadi supaya *clear* juga dan didengar oleh publik itu tentang *outsourcing* ini.

Jadi itu kurang lebih Pimpinan, terima kasih.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.



**KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-GOLKAR/WAKIL
KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Saya mohon izin saya pimpin sementara ini, jadi saya supir tembak dulu, maklum supir utamanya lagi menghadap Yang Maha Kuasa, menghadap, bukan bertemu, menghadap, kalau bertemu *passed away kan gitu*, tapi kalau menghadap, memang kita harus selalu menghadap.

Habis tadi Mas Karding, masuk Pak Hendrik baru Pak Menteri ya atau.

Mas Karding silakan.

**(PERGANTIAN KETUA RAPAT SEMULA H. EDDY SOEPARNO,
S.H., M.H. MENJADI MAMAN ABDURRAHMAN, S.T.)**

F-PKB (H. ABDUL KADIR KARDING, S.Pi., M.Si.):

Baik, tadi itu karena tergesa-gesa jadi ada banyak, ada beberapa hal yang masih, baru ingat setelah duduk merenung-merenung *gitu ya*. Yang pertama, soal komitmen kita soal energi baru terbarukan, kalau energi baru terbarukan ini kita tahu bahwa bahan, bahan ininya *tuh* lebih mahal daripada batubara sebenarnya, apa namanya bahan dasarnya untuk mengkonversi itu lebih mahal.

Oleh karena itu, ini *anu* aja, pesan aja kepada Pak Dirut memang kita punya komitmen terhadap energi baru terbarukan, tapi jangan sampai terlalu membebani uang negara. Artinya cari solusi teknologi lah yang bisa mengolah sumber energi baru terbarukan ini jadi lebih murah daripada batubara, itu menjadi dilema kita *kan*. Posisi kita sangat dilema dalam konteks, ini yang pertama, jadi hanya apa namanya penegasan aja.

Yang kedua, dengan transformasi perusahaan ini menjadi *holding sub-holding* ini yang ada sekarang ini, itu artinya apa? PLN ini harus didorong untuk betul-betul berjiwa dan berkarakter bisnis. Banyak peluang-peluang bisnis di luar murni kelistrikan, satu contoh misalnya tadi yang disampaikan soal digitalisasi, terkait dengan apa namanya perusahaannya subnya? Icon Plus, siapa direktornya Mas Rahmat ya?

DIREKTUR:

Saya Pak Ari, Pak.

F-PKB (H. ABDUL KADIR KARDING, S.Pi., M.Si.):

Pak Ari. Maksud saya dengan peluang ini, ini kan bisnis yang kalau kita eksplorasi tanpa batas dan bisa sangat menguntungkan digital ini. Digital, internet kita jadikan satu ekosistem menjadi *green* dan itu akan apa namanya



memberi nilai tambah sekaligus juga pelayanan yang lebih baik untuk masyarakat.

Jadi kalau menurut saya ya, kalau menurut saya Pak Dirut ini, saya *nggak* kenal ya Pak Ari, saya *nggak* kenal, baru ini juga saya tahu beliau. Maksud saya mulai energi PLN ini, mulai dari struktur, *capital*, energi itu mulai coba mengembangkan ke sana, mengembangkan agak serius supaya proses digital, membangun ekosistem *green* ini bisa baik. Oleh karena itu mungkin ini bagus kalau kita coba kita lihat, supaya ada *balances* bisnis yang ada paralel ya sama yang murni kelistrikan.

Jadi hanya dua itu yang ingin saya sampaikan, yang ketiga lapor aja. Saya beberapa minggu terakhir ini di rumah saya itu listrik suka mati Pak, mohon maaf Pak, suka mati. Kemarin itu kemarin sore itu 2 jam mati, *nggak* tahu ada perbaikan katanya.

Jadi ini menurut saya mungkin namanya juga transformasi, namanya lagi menuju itu pasti belum bisa 100% kokoh, kuat itu belum bisa, betul-betul tanpa ada pemadaman itu dengan alasan apapun. Oleh karena itu laporan aja bahwa di tempat saya aja masih sering mati beberapa minggu ini, suka mati, kita lagi mandi itu mati, pusing kita Pak, lagi mandi mati. Jadi itu Jakarta ya, saya *nggak* tahu desa-desa luar Jawa dan sebagainya, pelaporan aja.

Terima kasih Pak Ketua.

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Iya. Terima kasih, Mas Karding.

Saya interaktif sedikit Pak Dirut, saya ini tergelitik bicara mengenai angka target 35.000 megawatt itu *loh*. Ini tolong langsung direspon, 35.000 megawatt itu di situ *including project* pembangunan PLTU saja atau bersama-sama dengan transmisi.

DIRUT PT PLN (PERSERO):

Termasuk dengan transmisi.

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Include di dalam situ ya, *nah* artinya kan berarti sekarang kan wacana yang muncul di PLN itu *over supply* Pak iya *kan*. Apa *sih* Pak yang menyebabkan akhirnya hari ini PLN ini bisa menjadi *over supply*, tapi di sisi lain kita masih banyak sekali dapat permohonan-permohonan dari beberapa pelaku industri, dari masyarakat, segala macam terkait kekurangan pasokan listrik.

Nah ini *loh*, *nah* ini yang kadang-kadang kan kontradiktif, artinya berarti kan ada *bottleneck* tuh, Pak. *Bottleneck* itu yang saya pikir harus diselesaikan,



maksud saya disaat penyuplai listriknya sekarang itu PLN mengatakan bahwa *over supply*, tapi di sisi lain industri kebutuhan, membutuhkan listrik juga pasokan listrik. *Nah* ini yang harus di-*connect*-Indonesia, itu apa sih Pak yang menyebabkan kita *over supply*. Ini biar memoderasi karena tadi ada bahas 35.000, *over supply*, segala macam.

Itu aja Pak, silakan Pak.

DIRUT PT PLN (PERSERO):

Terima kasih Pimpinan.

Bahwa di tahun 2015 di Jawa itu diperkirakan pertumbuhan listrik adalah sekitar 7 sampai 8% Pak, di tahun 2014-2015 dan pertumbuhan diperkirakan 7 sampai 8% itu berbasis pada asumsi pertumbuhan ekonomi di saat itu. Jadi asumsi yaitu pertumbuhan ekonomi sekitar 6,1%, kemudian juga ada korelasi antara pertumbuhan ekonomi dengan pertumbuhan *demand* di saat itu yang berbasis pada *historical data*, yang pada waktu itu angkanya sekitar 1,3.

Jadi kalau 1% pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan *demand* listriknya 1,3 artinya kalau 6,1% pertumbuhan ekonomi di saat itu. Maka pertumbuhan listriknya sekitar 7 sampai 8% *gitu*. *Nah* berbasis pada asumsi tersebutlah dirancang penambahan atau ekspansi infrastruktur ketenagalistrikan yang berbasis pada satu pertumbuhan ekonomi 6,1 korelasinya 1,3 begitu Pak.

Kemudian selama 5 tahun, jadi korelasi antara pertumbuhan ekonomi dengan pertumbuhan listrik itu bergeser, bergeser begitu Pimpinan. Jadi pada saat pertumbuhan ekonominya berbasis pada *e-commerce* dan pariwisata, ternyata korelasinya bergeser, korelasinya bukan 1,3 tapi misalnya turun menjadi 0,86 atau 0,9.

Artinya pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak dibarengi dengan pertumbuhan *demand* listrik yang tinggi, tapi kalau misalnya pertumbuhan ekonominya berbasis pada industrialisasi, maka korelasinya kemudian naik lagi.

Nah selama 5 tahun kemarin terutama di Jawa, korelasinya turun dari 1,3 menjadi 0,87% jadi kalau 1% pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan *demand*-nya hanya 0,86%. Kemudian juga pertumbuhan ekonomi terkoreksi dari 6,1 rata-rata menjadi 5,1% begitu Bapak.

Nah untuk itu selama 5 tahun pertumbuhan *demand* listrik yang diproyeksikan adalah sekitar 8% di Jawa tumbuhnya rata-rata hanya 4,6% selama 5 tahun, antara 2015 sampai 2019. *Nah* di tahun 2020 terkena Covid-19, jadi pertumbuhan selama 5 tahun tidak sesuai dengan harapan, kemudian tahun 2020 terkena Covid.

Nah untuk itu di total misalnya di tahun ini kalau kita menggunakan asumsi pertumbuhan *demand* listrik di tahun 2015, maka total konsumsi listriknya 400. Jadi mohon izin, kalau kita menggunakan asumsi di tahun 2015



maka konsumsi listrik hari ini adalah 380 Twh Pak Pimpinan, kalau kita menggunakan asumsi 2015 dan itu harus kita penuhi.

Sedangkan faktanya tahun ini adalah 283 Twh, jadi ada 100 Twh di bawah dari yang direncanakan begitu Pak. *Nah* itulah bahwa pada waktu itu apakah asumsinya itu sudah sesuai dengan harapan, ternyata bergeser begitu Pak. Kemudian korelasi antara pertumbuhan *demand* listrik dengan pertumbuhan ekonomi juga bergeser.

Nah saat ini pertumbuhannya sudah kembali ke 6,17% Pak Pimpinan, jadi sudah kembali tetapi karena 6,17 dikalikan 280 jadi pertumbuhannya juga masih tidak sesuai dengan perencanaan dari tahun 2015. Maka dengan adanya seperti itu pengembangan dari infrastruktur ketenagalistrikan mengalami *over supply*, dengan asumsi yang bergeser.

Demikian, Bapak.

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Oke Pak, makasih banyak Pak Dirut ya ini nanti sambil sebelum nanti masuk ke Pak Menteri dan Pak Hendrik. Artinya begini Pak, *nggak* saya penting Pak menyampaikan ini, apa kita diskusi mengenai *over supply*, tidak *over supply*. Sebelumnya ini saya agak grogi Pak sekarang kalau rapat dengan PLN karena ada kawan saya muncul di situ, Pak Mamid sekarang bergabung di PLN, luar biasa.

Jadi pintar aja PLN ini dia taruh Pak Mamid di situ biar saya grogi karena tadi saya lihat waktu saya belum ngomong dia santai Pak, tapi pas saya ngomong dia kayaknya udah mulai pasang-pasang *gitu*. Jadi ada beda gestur tubuhnya Pak setelah saya ngomong.

DIRUT PT PLN (PERSERO):

Kami pastikan bersahabat, Pak.

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Jadi begini Pak, apa saya itu orang yang *nggak* pernah mau terjebak dengan narasi-narasi purbakala, Pak. Jadi saya sebut itu namanya narasi purbakala, apa itu narasi purbakala? Liberalism, nasionalisme sempit kayak *gitu-gitu* karena sekarang ini sudah tahun 2022, kita ini sudah harus mulai berpikir *open minded, out of the box gitu*.

Artinya dalam konteks kita menyelesaikan permasalahan kebangsaan harus melihatnya secara komprehensif, itu kenapa dari dulu saya terkesannya, ini kan terkesan *nih* Pak. Saya ini anti BUMN, terkesannya, padahal sebetulnya saya ini orang yang paling sayang dan paling cinta dengan BUMN, *oh* boleh

diuji kalau dibelah ini isi dada saya ini Pak, isinya BUMN *forever gitu*, tapi terkesannya begitu.

Cuman karena saya sayang dan cintanya dengan BUMN, pendekatan saya dalam mendorong perusahaan-perusahaan BUMN itu berbeda dengan orang-orang. Saya *tuh* ingin BUMN itu menjadi seorang anak yang badannya berotot Pak, gagah, fisiknya kuat, staminanya keren *gitu*, itu hanya dapat didapatkan kalau dengan *exercise*, latihan *fitness*, olahraga teratur, makan nutrisinya harus dijaga *gitu*. Itu coba kita perhatikan *gitu* tapi kalau badannya, kalau terlalu dimanja, jarang latihan, tidak *exercise*, tidak pernah pergi olahraga nanti badannya kayak saya, kayak Pak Nasir *nih* berdua *gitu*, jadi kurang berotot *gitu* Pak.

Nah itu yang saya inginkan sebetulnya jadi pendekatan itu berbeda, kebanyakan selama ini narasi praktik liberalism, nasionalisme itu sering sekali dijadikan jargon oleh sebagian besar publik untuk meninabobokan BUMN-BUMN kita karena faktanya *kan*, kami ini *kan* udah keliling-keliling dunia Pak, udah jalan-jalan dulu ke negara-negara ini.

Hampir semua *nggak* ada *tuh* yang kesulitan listrik, *nah* artinya begini tadi menjawab tadi. Ini nyambung semua *nih* karena ada yang bilang jangan sampai kita dorong sub-*holding*-sub-*holding* ada yang protes *gitu* kan, Bapak dihajar, oh ini PLN bikin sub-*holding*-sub-*holding* nanti didorong privatisasi-privatisasi. Terus pertanyaannya kalau privatisasi kenapa? Memangnya kata privatisasi kata yang mengerikankah, memangnya dengan privatisasi ini barang haram kah?

Bahkan ada lagi lebih ekstrimnya Pak, ada lagi *nih* yang lebih ekstrim, *oh* Pak Maman itu pendukung liberalism. Terus saya bilang emangnya liberalism kata-kata yang haram kah? Artinya kalau saya mau tantang orang-orang yang bicara tentang liberalism. Artinya kita dijebak dengan narasi liberalisasi, narasi privatisasi dan lain sebagainya, seharusnya yang ingin saya sampaikan perdebatannya itu bukan pro liberalism, pro privatisasi BUMN pro apapun.

Perdebatannya apakah sebuah sistem ataupun kebijakan yang dikeluarkan oleh Pak Dirut itu betul-betul bisa memberikan kemanfaatan buat perusahaan Bapak-bapak dan bangsa dan negara ini. Mau pake gaya privatisasi kah, mau pakai BUMN *full* kah, mau dimonopoli oleh BUMN kah, mau diliberalisasi kah *that's it doesn't matter*, itu bukan sesuatu yang terlalu penting dan itu hanya cara karena prinsip-prinsip dasar kita di Pancasila itu udah jelas itu sila ke-5 itu "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia", bukan keadilan sosial bagi para perusahaan-perusahaan BUMN. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia *gitu loh* Mas, maksudnya.

Artinya maksudnya saya mau memoderasi ini, saya belum mau masuk ke *power willing* karena temanya kita bukan di situ saya pikir itu nanti saja Pak. Saya *put in power willing* itu nanti aja Pak, karena agenda kita bukan itu.



Tapi saya ingin kita menyamakan frekuensi kita bersama, Pancasila itu Sila ke-5 itu "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" bukan keadilan sosial bagi Darmawan Prasajo, bukan keadilan sosial bagi Maman Abdurrahman, bukan keadilan sosial bagi perusahaan listrik negara, itu Pak.

Lalu sila Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 ayat (2) dan (3) itu disebutkan frasa "dikuasai negara", bentuk frasa dikuasai negara tidak satu-satunya melalui BUMN, perpanjang tangan ESDM dan lain sebagainya itu juga dikuasai negara dan dimanfaatkan sepenuh-penuhnya untuk kemaslahatan umat Pak.

Artinya saya ingin luruskan bagi kita semua, mau kita pakai anak kandung kah, mau kita pakai anak tirikah, mau diprivatisasi kah, mau di BUMN kah selama itu bisa memberikan kemanfaatan 100% untuk bangsa dan negara *that's it* nasionalisme.

Nah ini yang saya selalu bilang kita balik lagi ke PLN, monopoli itu bagus tapi kalau terlalu monopoli kegemukan Pak, badan itu menjadi gendut, badan itu jadi susah bergerak, tidak di-*exercise*. *Nah* ini yang memang menjadi bahan diskusi kita bersama, artinya saya juga sekaligus mau membela Bapak-bapak juga yang di PLN, Bapak mau dorong itu buat sub-*holding*, 1.000 sub-*holding* juga *nggak* ada masalah Pak, saya *nggak* di situ, jadi saya mungkin berbeda dengan teman-teman terkait sub-*holding*, *holding*, segala macam.

Saya lebih menginginkan perdebatannya jauh ke depan, mau Bapak buat 1.000 sub-*holding*, ini bukan karena ada Pak Mamid Pak di situ Pak, jangan sampai gara-gara Pak Mamid di sub-*holding* itu Pak Maman bela sub-*holding*, *nggak*, saya pikir mau Bapak buat sub-*holding* di bawahnya lagi ada anak cucu, cicit, segala macam *nggak* penting Pak, yang penting itu Bapak buat itu bisa *nggak* memberikan pemanfaatan buat perusahaan, bisa *nggak* memberikan pemanfaatan buat bangsa dan negara.

Jadi saya ke situ, *nah* berangkat dari pertanyaan pertama saya mengenai *over supply* ini, ini *nih*. Artinya kan di sini Pak Dirut, berarti kata-kata *over supply* itu sepemahaman saya ada listrik sekarang ini Pak, bertumpuk di masing-masing region-region Bapak kan begitu Pak, kan logika saya begitu.

Jadi ada listrik menumpuk di region-region Bapak itu jadi kayak siapa musuhnya *spider-man tuh* yang listrik, di Elektro itu Pak. Jadi saya pikir kayak begitu Pak, jadi ada listrik berkumpul kurang lebih totalnya 380 terawatt *hour* itu berkumpul, Pak. Tapi kan ternyata Bapak mandek itu baru asumsi ya berdasarkan pendekatan prospek perhitungan asumsi ekonomi kita, yang riilnya sekarang 283 terawatt *hour*, itu riil ada ya, riil binatang yang namanya listrik tadi itu ada 283 terawatt *hour* Pak ya.

DIRUT PT PLN (PERSERO):

280 terawatt.



KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Iya 280 terawatt *hour*, artinya maksud saya begini, ini aja saya butuh, butuh *clear* di situ. Artinya apa yang disampaikan *over supply* itu hari ini kita baru punya 283 terawatt *hour*.

DIRUT PT PLN (PERSERO):

Demand Pak.

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Demand ya, nah yang 380 terawatt hour itu, itu apa Pak?

DIRUT PT PLN (PERSERO):

Mohon izin.

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Iya silakan Pak.

DIRUT PT PLN (PERSERO):

Jadi dari prediksi bahwa kita seharusnya saat ini 380 terawatt *hour*, maka disusun lah penambahan kapasitas yang waktu itu imajinasinya 380 terawatt *hour*.

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Oh nggak apa-apa Pak, saya cuma butuh artinya itu baru perencanaan berdasarkan pendekatan asumsi peningkatan ekonomi kita.

DIRUT PT PLN (PERSERO):

Dan pada waktu itu direncanakan penambahan kapasitas untuk memenuhi 380 terawatt *hour* hari ini Pak.

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Sudah di-tender-kan semua itu Pak, *project* nya.



DIRUT PT PLN (PERSERO):

Sudah Pak.

**KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-GOLKAR/WAKIL
KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Project itu ya.

Oke, sudah jalan Pak ya.

DIRUT PT PLN (PERSERO):

Sebagian kita bisa batalkan Pak, kita kurangi, kemudian kita undur kontraknya kita kurangi yang kita sebut dengan renegotiasi Pak. Di mana kami berhasil mengurangi beban *take or pay* sekitar 40 sekian triliun.

**KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-GOLKAR/WAKIL
KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Nah oke, artinya gini nanti habis saya ini baru masuk ke Pak Hendrik, ke Pak Menteri. Buat secretariat, nanti *next* rapat itu biar kita tersistem enak *gitu*, jadi semua kita tuh menyelesaikan, habis ini kita masuk kepada temanya khusus permasalahan imajinasi 380 terawatt *hour* itu aja, *next time* nanti kita agendakan.

Jadi biar nanti teman-teman PLN juga bisa memaparkan karena nanti ada korelasi terhadap Undang-Undang EBET kita Pak, Undang-Undang EBET itu, Pak. Jadi ini biar kita mendapat gambaran utuh juga seperti apa, bagaimana *gitu*, itu usulan konkrit, tapi nanti aja. *One day* agenda rapat selanjutnya seperti itu ya.

Ya, silakan Pak Hendrik, habis itu Pak Menteri ya, *monggo* Pak Hendrik.

F-DEMOKRAT (Drs. HENDRIK SITOMPUL, M.M.) :

Terima kasih Pimpinan.

Pimpinan dan Anggota Komisi VII yang terhormat,
Pak Dirut PLN beserta jajaran yang kami hormati.

Selamat datang di Komisi VII.

Kalau saya hanya terkait dapil aja Pak Dirut, terkait kinerja teman-teman di dapil saya. Saya berharap bahwa rumah di dapil saya terang semua Pak, rumah dan lingkungan. Jadi judul kami itu ruling, rumah dan lingkungan itu terang, *nah* kelihatannya masih banyak rumah-rumah penduduk di dapil saya itu belum terang, Pak.



Buktinya adalah ketika kita mencari-cari masyarakat yang belum ada sambung jaringan itu masih banyak. *Nah*, untuk itu kita berharap bahwa teman-teman PLN proaktif lah *gitu* mencari masyarakat-masyarakat yang belum pelanggan itu Pak, karena jangan menunggu begitu karena selama ini kan kita melihat menunggu teman-temannya.

Jadi kalau boleh saran saya proaktif lah mengejar masyarakat-masyarakat yang belum jaringan listriknya di rumahnya *gitu* karena masih banyak, dapil saya masih banyak, Pak. Jadi kita harapkan setiap tahun itu berkuranglah, kita *nggak* usah terlalu apa ambisi sekali tapi setiap tahun berkurang. Artinya masyarakat bisa terang di sana dan memang waktu program-program kita jaringan baru, jaringan listrik baru itu luar biasa antusiasnya Pak, luar biasa tapi masih ada terus, masih ada terus. Artinya masyarakat di dapil saya itu masih banyak yang belum jaringan listriknya masuk rumah *gitu*. Itu Pak, kira-kira supaya teman-teman di dapil, di PLN, teman-teman PLN di dapil saya bisa proaktif.

Yang berikutnya ada di dapil saya ada kebijakan, saya *nggak* tahu *nih* seluruh BUMN kali ya. BUMN ini ada kerjasama dengan Poldasu, dengan Kejatisu *gitu* ya saya *nggak* tahu, saya tahu maksudnya apa *gitu* ya. Semestinya sama Komisi VII pendampingan juga lah walaupun alasannya katanya pendampingan, pendampingan-pendampingan dengan Poldasu, pendampingan dengan Kejatisu, saya *nggak* tahu kebijakan apa ini.

Menurut saya lebih baik pendampingan Komisi VII lah di dapil *gitu* menurut saya *gitu loh*, kenapa yang di hulu tidak dikomunikasikan, justru yang di hilir yang diajak berteman *gitu loh*. Semestinya kita *dong* yang diajak untuk mendampingi program-program PLN di dapil kira-kira *gitu*, jangan Poldasu, Kejatisu.

Maksudnya apa kayak kita *nih* mau buat jahat *gitu* ya, mau melanggar hukum padahal kan tidak maksudnya *kan, kan* kita melayani masyarakat *gitu*. Justru pelayanan masyarakat tidak harus berhubungan sama penegak hukum harusnya kalau menurut saya *sih*.

Jadi saran saya Pak Dirut, teman-teman di dapil boleh lah kita dampingi *gitu loh*, jangan didampingi sama Poldasu, sama Kejatisu, kita *nggak*, justru kita *nggak* diajak *gitu loh*, harusnya kita diajak juga *gitu loh* karena kan kita yang di hulunya pada kebijakan PLN ini *gitu* ya.

Itu aja saran saya, terima kasih Pak Dirut.

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Terima kasih, Pak Hendrik.

Nah itu betul Pak, artinya biar kehadiran dan keberadaan teman-teman Komisi VII itu bisa dirasakanlah, dianggap memiliki dampak terhadap wilayahnya masing-masing *gitu*. Kalau urusan sama aparat itukan urusan



belakang aja Pak, *nggak* usah di depan-depan, jangan sampai nanti kalau terlalu muncul aparat nanti disangkanya ada gimana-gimana lagi ya.

Selanjutnya Pak Menteri.

F-GERINDRA (KATHERINE A. OENDOEN):

Pimpinan daftar.

**KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-GOLKAR/WAKIL
KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Oh ini rekan satu dapil saya Pak, jadi harus saya kasih kesempatan ini.

Silakan Pak Menteri.

F-PKB (MARWAN JAFAR):

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pimpinan Pak Maman dan Pak Darmo dan seluruh jajaran yang saya hormati, Teman-teman Komisi VII yang saya banggakan.

Tadi sebetulnya sudah diomongkan Pak Maman semua, jadi saya mengamini saja sebetulnya dan soal swastanisasi versus nasionalisasi terhadap PLN ini. Jadi kita harus punya narasi besar terhadap ini karena memang sejak dari dulu ini PLN selalu bermasalah.

Ya mungkin *fraud*-nya terlalu banyak dan berganti-ganti direksi juga tentu berganti-ganti kebijakan dan seterusnya. Maka saya mendorong bahwa untuk merangkul swasta sebanyak-banyaknya PLN ini karena kalau sendirian dan eranya sudah berbeda kan bahwa kalau sendirian seperti ini banyak kedodoran pasti.

Apalagi rezim-rezim juga belum termaksimalkan dalam konteks bahwa secara menyeluruh itu menjadi baik. Saya ambil contoh misalnya soal listrik-listrik di pedesaan, kita *kan* semuanya mendukung itu dari dulu. Tapi pada kenyataannya sampai hari ini di pulau-pulau terluar, di daerah-darah pinggiran, di daerah-daerah perbatasan dan seterusnya itu belum ada listrik di sana.

Saya kira kalau program ini dilanjutkan Pak Dirut, Pak Darmo ini pahalanya buat Bapak dan kita semua yang ada di sini. Apalagi ini waktu pemerintahan ini tinggal kurang lebih 1 tahun, nanti kalau pemerintahan berganti tentu ya bisa jadi terputus dalam hal ini karena ya namanya kekuasaan itu selalu berganti, Pak.

Mana Ustadz tadi sudah kabur ya, qur'annya itu kira-kira begini "*watilkal ayyamunuda wilhaa bayyinannas*" kekuasaan itu selalu berganti, ada yang di atas ada yang di bawah dan terus, orangnya juga berganti dan itu apa namanya



saya kira soal nasionalisasi, soal privatisasi, soal swastanisasi ini menjadi penting untuk kita diskusikan secara lebih mendalam.

Dan saya mendorong sekali lagi bahwa ini harus dikerjakan bersama swasta karena swasta lebih cepat biasanya dan lebih profesional, sekaligus juga lebih, lebih gesit dibandingkan apa, suprastruktur negara, itu. Makanya perombakan dan reformasi birokrasi di PLN itu juga menjadi penting dan sudah dilakukan oleh Pak Dirut Pak Darmo dan itu patut kita apresiasi.

Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah soal EBT, ini berkali-kali kita di sini membahas soal EBT dan seterusnya. Tetapi pada kenyataannya memang ini semua masih sulit untuk dilakukan secara lebih mendalam soal EBT ini tentu soal EBT ini, ini menjadi PR yang besar.

Presiden sudah, selalu ngomong soal ini tetapi di bawahnya, aparat di bawahnya ini masih sangat lamban soal EBT dan ini bukan persoalan Indonesia sebetulnya soal EBT ini, ini adalah persoalan dunia. Oleh karena itu kalau memang kita berhasil men-*direct* ini menjadi sebuah kenyataan yang faktual saya kira ini akan mendapatkan banyak manfaat untuk masyarakat kita dan sekaligus juga kita punya kekayaan alam yang luar biasa, bisa dibuat misalnya PLTS, PLTA, macam-macam lah itu soal EBT ini.

Nah oleh karena itu sekali lagi bahwa saya mendorong EBT ini coba libatkan swasta Pak, jadi supaya lebih cepat juga bentuk faktualnya. Di samping juga Pak Dirut PLN juga sudah kerja sama dengan perguruan tinggi, ada 9 perguruan tinggi Pak, ya. *Nah* ini saya kira lebih bagus karena biasanya perguruan tinggi juga punya inovasi sekaligus juga yang lebih penting adalah bagaimana meningkatkan kapasitas SDM di PLN itu sendiri, sekaligus meningkatkan pengembangan *project* dan pengembangan usaha di PLN.

Nah inilah yang kita tunggu-tunggu sebetulnya, MOU dengan 9 perguruan tinggi itu dalam rangka untuk macem-macam tentunya, bisa untuk energi terbarukan, bisa untuk manajemen, bisa untuk apa peningkatan kapasitas kelistrikan dan seterusnya. Ini sangat bagus dan saya memang cenderung, ini Indonesia ini *kan* sebetulnya banyak orang pintar dan menggunakan, semua hampir semuanya disekolahkan oleh negara.

Tetapi pada ketika pulang di Indonesia ini *melempem* semua ini persoalannya, maka kerjasama dengan perguruan tinggi ini kita bangkitkan perguruan tinggi dan sekaligus kalau bisa dengan BRIN juga, meskipun BRIN banyak masalah tapi banyaklah saya kira di dalam BRIN itu yang bisa dikerjasamakan dalam konteks ini karena ini mirip-mirip ini apa namanya Tupoksinya.

Nah yang ketiga adalah coba Pak Dirut membuat narasi selama 1 tahun ini, apa prioritas pekerjaan yang harus dilakukan selama hampir kurang lebih 1 tahun ini. Sehingga poin-poin *project*-nya itu menjadi jelas dan lebih terukur, tidak mengawang-awang dan tentu faktual.

Coba dibuat narasi atau semacam *blueprint* selama 1 tahun ini dan kami diberikan, kalau rapat berikut nanti diberikan semacam itu, sehingga *oh iya* PLN sudah akan melakukan a, b, c, d dengan yang sudah dilakukan ini, ini, ini. Ini meskipun 1 tahun saya kira, meskipun dari awal itu sudah dibuat tetapi ya memang tidak berjalan dengan baik.

Jadi secara konseptual 1 tahun ini menjadi sebuah rujukan bagi kita semua, apa capaian-capaian PLN yang sudah dan akan dibuat, terutama yang akan dibuat. Itu menjadi penting karena dalam konteks misalnya *over supply* ini, itu juga nilainya juga besar Pak.

Dalam konteks *over supply* tentu kita membutuhkan dana yang besar, kurang lebih 6 miliar US dolar. Ini bukan dana yang kecil, oleh karena itu ini harus dimanfaatkan yang seluas-luasnya yang kurang lebih 87,3 triliun. Oleh karena itu dalam konteks *over supply* ini saya juga mendorong bahwa seperti halnya, misalnya PLN membuat Papua terang misalnya, contoh kan ada Papua terang.

Bagaimana misalnya tadi saya sebut desa-desa yang di pinggiran, di perbatasan dibuat desa terang misalnya, ada program itu misalnya dan itu bisa dikerjasamakan dengan berbagai macam Kementerian. Dan kalau itu bisa dilakukan maka *over supply* ini saya kira tidak menjadi kendala bagi kita semua.

Kemudian yang selanjutnya adalah disebutkan ada 27 *project* strategis nasional oleh PLN. Coba Pak mungkin kami diberikan semacam gambaran atau *list* dan ini bisa tertulis jawaban ini 27 *project* strategis nasional di Jawa bagian barat. Ini tentu yang di bagian timur juga dibuatkan tentu, jadi kita bukan Jawa *sentris* juga tapi harus Indonesia *sentris*.

Nah ini sekali lagi bahwa 27 *project* ini kami diberikan *list* seperti apa, termasuk bagaimana misalnya kita membutuhkan pembangkit-pembangkit supaya diperluas. Sehingga yang selalu kita katakan *byar pet* itu, itu menjadi ternihilisasi dari apa yang disebut dengan *project* yang sangat strategis itu.

Jadi ini penting untuk diketahui bahwa sekali lagi persoalan sub-*holding* dan seterusnya itu ya bagus-bagus saja sebetulnya tidak ada masalah, tetapi dengan catatan bahwa itu harus dilakukan secara transparan, kredibel, profesional dan tentu punya akuntabilitas yang kuat.

Saya kira itu dan yang terakhir adalah bahwa kerjasama dengan Kementerian ESDM, kerjasama dengan institusi lain misalnya TNI/Polri, saya kira ini juga penting dilakukan karena TNI/Polri lebih cepat saya kira kerjanya karena satu komando, terutama untuk menangani *bottle neck-bottle neck* yang terjadi di PLN. Jadi itulah gambaran dari semacam PLN, meskipun ya tadi Pak Maman menyebut monopoli, ya memang monopoli tapi kalau kita menggandeng swasta saya kira ceritanya akan berbeda.

Dan itu yang saya sampaikan ada beberapa poin, mudah-mudahan ini menjadi bermanfaat buat kita semua dan seluruh rakyat Indonesia.

Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**(PIMPINAN RAPAT BERGANTI KEMBALI DARI PAK MAMAN
ABDURRAHMAN, S.T. KE H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H.)**

**KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA
KOMISI VII DPR RI):**

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Berikut Ibu Katherine silakan.

F-GERINDRA (KATHERINE A. OENDOEN):

Terima kasih Pimpinan.

Selamat siang Pimpinan.

Direktur PLN bersama jajaran dan Rekan-rekan Komisi VII yang saya hormati dan saya cintai.

Tadi Pak Dirut, para Bapak-bapak sudah banyak bertanya, saya hanya ingin bertanya tentang yang Pak Dirut mengatakan kalau PLN sudah *over supply* secara nasional. Tapi intinya untuk di dapil saya Kalimantan Barat, ketersediaan listrik masih defisit, sering terjadi pemadaman.

Pertanyaan saya, apa strategi PLN agar tidak terjadi lagi pemadaman di Dapil saya dan kedua, waktunya kira-kira kapan, atau berapa lama lagi agar saya bisa menjelaskan kepada masyarakat itu, Pak.

Yang berikutnya juga saya ingin memberitahukan, kalau daerah kami terdiri dari 14, 12 kabupaten dan 2 kota, berarti kami mempunyai 14 ya Pak kabupaten campuran kota. Tahun 2020 anggaran yang diberikan kepada PLN Kalimantan Barat itu sebanyak, 2021 sebanyak 271M sehingga bisa mengalirkan listrik 82 desa.

Tahun 2022 menurun 197M hanya bisa dialirkan listrik 56 desa, ingin saya pertanyakan Pak, kenapa tahun 2022 anggarannya jadi berkurang. Sedangkan daerah kami cuma jumlah desa itu 2.130 desa yang sudah teralirkan listrik 1.678 berarti yang belum teralirkan listrik 452. Dari 452 kalau diberikan anggaran setiap tahun hanya 100 atau 200 miliar, otomatis yang bisa dialirkan listrik hanya 50-an ke atas.

Jadi kapan daerah kami bisa menikmati terang, yang saya juga kasih masukan kepada Bapak Direktur di desa kami itu di Kalimantan Barat, saya bingung dengan peraturan pemerintah atau Pak Dirut ya. Setiap desa dianggap sudah terang, padahal masih banyak KK atau dusun yang belum teralirkan listrik.



Intinya Pak Dirut, tidak mungkin PLN akan datang lagi ke desa itu untuk menerangkan dusunnya. Sejauh apapun dusun apabila bersatu dalam desa, kami mengharapkan itu semua desa kalau dianggap 100% otomatis dusun per-KK-nya sudah teralihkan listrik, itu PR Pak PLN.

Pak Dirut *sorry*, jadi saya sebagai wakil dan juga Pak Maman, kami di Dapil yang sama Kalimantan Barat sangat miris karena daerah kami 3t. memang daerah kami itu jauh, jalan juga masyarakat tidak mendapatkan fasilitas yang benar, apalagi PLN.

Jadi apapun masalahnya kami tidak mau tahu Pak, mobil truk *nggak* bisa masuk atau apa kami *nggak* mau tahu, bagaimana caranya daerah itu hidup listrik. Kalau kami di Kalimantan Barat tidak terang, bagaimana masyarakat kami akan merasakan merdeka, bagaimana mereka bisa berkembang dan pintar, ini Pak Dirut.

Buktinya saya sangat berat banyak proposal tapi saya harus serahkan kepada Pak Dirut di pusat dan nanti tembusan saya bawa juga ke GM PLN. Intinya ya Pak Dirut saya minta anggaran untuk Kalimantan Barat dinaikkan, setuju *nggak* Pak Maman. Kita hanya dapat 197 tahun lalu, saya harapkan Pak Dirut bisa kasih kami 250 atau 300M sehingga bisa 100 desa yang teralihkan listrik, janji *nggak* Pak Dirut? Kalau 300M otomatis desa kami bisa 100 sampai 120 desa yang teralihkan listrik.

Jadi harapan saya Pak Dirut, kami ini mau kerja Pak dan saya bersama teman-teman yang lain memang mengharapkan daerah kami bisa dapat listrik, itu saja Pak. Boleh penyerahan Pak Ketua, Pak Maman terima kasih.

F-PDIP (Dr. Ir. WILLY MIDEL YOSEPH, M.M.):

Pimpinan, dari *Zoom* minta waktu untuk bicara.

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Baik Pak Willy.

F-PDIP (Dr. Ir. WILLY MIDEL YOSEPH, M.M.):

Karena pesawat sudah mau berangkat *nih*.

F-GERINDRA (KATHERINE A. OENDOEN):

Pimpinan, saya sudah menyerahkan proposal, saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Pak Dirut juga semoga bisa direalisasi dan kami mohon anggaran untuk tahun 2023 boleh dinaikkan Pak menjadi 300.

Terima kasih.

Selamat siang.



KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Terima kasih, Ibu Katherine.

Saya perpanjang dulu waktunya karena kita sudah melewati waktu yang sudah disepakati, kita perpanjang 30 menit sampai dengan pukul 13.50 WIB, setuju?

**(RAPAT:SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Lanjut, sebentar Pak Willy sebelum ke *Zoom* kita habiskan dulu teman-teman yang sudah hadir di sini fisik, setelah ini Pak Willy.

Silakan Pak Rico.

F-NASDEM (RICO SIA):

Baik, terima kasih Pimpinan.

Terima kasih juga kepada Rekan-rekan semuanya.

*Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Shalom,
Salam sejahtera untuk kita semua.*

Apresiasi kepada Pak Dirut PLN untuk tadi kita punya struktur yang baru di dalam ini dan juga tadi sudah banyak masukan dari rekan-rekan terkait untuk menjaga ini supaya PLN ini menjadi tetap semakin maju justru ya bukan nanti mundur ke belakang.

Saya juga sepakat dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Maman Pimpinan bahwa tidak peduli kita *nggak* mau tahu soal apakah itu mau swastanisasi dan lain sebagainya. Intinya adalah usaha dari PLN adalah untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa dan negara dan masyarakat, itu poin sasaran utamanya.

Untuk dapil saya, satu yang ingin saya tanyakan adalah terkait dengan program BPBL yang ada ini maka Pak Dirut bisa jawab atau tidak terkait dengan kuota yang ada untuk 1.050 yang kami dapatkan untuk bantuan kepada masyarakat itu.

Ada daerah yang baru dibangun jaringan-jaringan PLN-nya, *nah* pertanyaannya adalah apakah memungkinkan ini dimasukkan juga sekaligus di tahun ini atau bagaimana Pak, karena yang tahu *nih* apakah Pak Dirut atau siapa yang bisa menjawab karena sementara ini, sementara masih pengumpulan data dan masyarakat beberapa kampung di wilayah saya yang terluar ini karena ada jaringan yang sementara dibangun, apakah bisa diikutsertakan sehingga mereka nanti tidak perlu lagi mendaftar begitu.



Mohon izin interaktif Pimpinan, mungkin apakah bisa langsung dijawab sama Pak Dirut atau mungkin siapa *gitu*.

Terima kasih.

DIRUT PT PLN (PERSERO):

Ibu Evi dari BPLB jadi bantuan pasang baru listrik yang gratis itu mungkin di Papua bisa dijelaskan. Ini detailnya untuk BPLB untuk tiap provinsi, mohon izin Pak Rico. Jadi kami tidak hafal Pak, tapi direktur niaga kami barangkali bisa itu. Nanti kalau misalnya masih kurang nanti kita bisa diskusi lebih detail di secara *offline*.

DIREKTUR RETAIL DAN NIAGA PT PLN:

Mohon izin bapak Rico.

Jadi kalau untuk BPLB tahun 2023 itu memang kami rencanakan 83.000 Pak, tapi nanti detailnya di provinsi mana aja sedang kami mintakan ininya datanya, Pak. Jadi dari tahun lalu kita 80.000, tahun ini 83.000 Pak untuk seluruh Indonesia.

Demikian Pak, mungkin yang bisa kami sampaikan sementara sampai saya minta data detailnya, Pak.

DIRUT PT PLN (PERSERO):

Jadi mohon izin Pak Rico, memang saat ini sedang dalam proses perencanaan dan pengadaan jadi detailnya nanti kami diskusikan.

F-NASDEM (RICO SIA):

Baik, izin Pak Dirut ini kan terkait dengan apa namanya masa, masa pendaftaran yang diberikan kepada kami untuk diteruskan kepada masyarakat, bahwa itu sampai dengan tanggal 7, tanggal 7 Februari ini.

Nah sementara di daerah-daerah yang tadi, yang terluar, yang tidak ada jaringan dan lain sebagainya mereka *door to door*, lagi sementara jalan juga kita mengumpulkan untuk membantu mereka. *Nah* apakah masih bisa ini daerah Papua Barat ya, apakah masih ada perpanjangan waktu kalau terkait dengan mau diskusikan ini.

Terima kasih.

DIREKTUR RETAIL DAN NIAGA PT PLN:

Baik Pak, jadi kalau terkait dengan pendaftaran Pak, masih Pak, jadi masih bisa kita buka, masih kita nanti kalau 83.000 ini kan target 2023 ya Pak, melihat realisasi kami yang di 2022 itu juga melebihi target Pak. Jadi dari



80.000 kita lebih dari 80.000, jadi artinya nanti kalau misalnya lebih 83.000 ini masih kita buka peluang untuk pendaftaran Pak, kalau pendaftaran memang masih dibuka tentunya sampai dengan apa namanya akhir tahun begitu Pak, jadi masih.

Intinya begini Pak, nanti yang sudah ada itu kami pasang dulu begitu Pak, tetapi kalau ada tambahan-tambahan baru itu nanti bisa sambil jalan begitu Pak. *Nah* ini saat ini memang tadi sudah dijelaskan Pak Dirut ini sudah proses pengadaan Pak sekarang dan ini memang belajar dari tahun lalu kita sudah perbaiki proses pengadaannya, sehingga bisa lebih tepat waktu Pak.

Jadi kalau yang tahun lalu memang kita agak dikejar di akhir tahun Pak, numpuk di akhir tahun ya Pak. Ini nanti mulai dari awal sudah kita jalankan Pak, jadi yang sudah siap kita segera sambung dulu di awal-awal.

Demikian Pak.

F-NASDEM (RICO SIA):

Baik, terima kasih Pimpinan.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Pak Willy masih ada?

F-PDIP (Dr. Ir. WILLY MIDEL YOSEPH, M.M.):

Ada.

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Ya, Pak Willy kami persilakan langsung, dilanjut Pak Ridwan Wittiri.

F-PDIP (Dr. Ir. WILLY MIDEL YOSEPH, M.M.):

Siap Pimpinan. Baik, terima kasih.

Pimpinan yang kami hormati,
Dirut PLN Pak Darmo dan seluruh jajarannya yang hadir pada kesempatan ini.

Saya langsung saja yang mengingat waktu dan juga kesempatan teman-teman saya melihat sangat antusias sekali. Apa yang telah disampaikan oleh Pak Dirut, kami memberikan apresiasi yang luar biasa tentang rencana-rencana kelistrikan kita ke depan.



Walaupun tadi saya melihat ada komponen yang masih tertinggal yang perlu dipikirkan juga di dalam perencanaannya itu, yaitu tadi ada kita sudah melihat ada batubara ya, kemudian ada gas, kemudian ada bahan bakar minyak, kemudian yang belum saya lihat itu adalah tentang EBTE-nya. Jadi mungkin itu juga sangat penting didalam perencanaan ke depannya.

Nah saya fokus saja ya kepada daerah pemilihan saya yaitu Kalimantan Tengah, tadi sudah dibicarakan Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, tentu juga semuanya tentu juga berbicara tentang bagaimana sambungan listrik ini.

Nah saya melihat gambaran bahwa untuk Kalimantan Tengah itu Pak Dirut ya, kita berbicara tentang sambungan listrik ya, sambungan listrik ke desa, *nah* apalagi ke rumah tangga, ya. Ada 15 ibukota kecamatan di Kalteng ya, itu PLN belum masuk, ya itu PLN belum masuk nah ini sangat, sangat lah memprihatinkan Negara Kesatuan Republik ini ya sementara kita tahu bahwa kehadiran PLN itu adalah kehadiran negara ya, di dalam kecamatan, di dalam kelurahan, di dalam desa maupun rumah tangga.

Maka untuk itu sebagai gambaran kita lihat *overview* kelistrikan desa Kalteng yang terakhir itu ya mungkin bisa ditayangkan, bantu ditayangkan ya supaya ini melihat satu kenyataan. Dari 1.571 desa itu udah kelihatan ya, dari 1.571 desa ya, yang PLN-nya belum masuk itu adalah 453, saya ulangi 453 PLN belum hadir di desa dan ibukota kecamatan.

Ini menjadi PR tantangan menurut saya, saya mengusulkan Pak Dirut ya untuk mengatasi ini, upaya yang sedang dan sudah kami lakukan bersama-sama dengan teman Komisi VII karena di Komisi VII ini ada 3 orang Pak Dirut, saya dari PDI Perjuangan, Pak Mukhtarudin dari Golkar dan kemudian Haji Iwan Kurniawan itu dan Gerindra, 3 orang, kami sudah berupaya.

Upaya kami adalah kami mengumpul atau mengundang ya Menteri ESDM, kemudian yang terkait dengan PLN juga pusat dengan Kementerian Keuangan, seluruh Bupati, Walikota, Pimpinan DPR dan juga Gubernur sudah kami rapatkan bagaimana solusi percepatan.

Dan saya melihat pergerakan ini masih belum Nampak, masih belum nampak ya ini kalau kita lihat 15 ibukota kecamatan yang belum ada PLN itu, ini gambarannya. Jadi oleh karena itu upaya ini sudah kami lakukan, kemudian kami ada khusus ya bertemu dengan Direktur PLN Pak Adi Distribusi dan kami membahas tentang percepatan pembangunan listrik di Kalimantan Tengah, itu juga kami lakukan dengan mengundang semua pihak yang terkait untuk membahasnya.

Tetapi saya masih melihat bahwa gerakan ini belum, belum mampu untuk mengizinkan apa yang menjadi keinginan kami agar PLN fokus kepada Kalteng ini untuk menyelesaikan.

Coba kita melihat rencana pembangunan di 2022, 2022 itu sudah, sudah dilaksanakan ya, sudah dilaksanakan 74 desa. 74 desa itu dengan anggaran 323 miliar, bisa ditayangkan ya, 74 desa dengan anggaran 323 miliar. Ada



penambahan anggaran Pak Dirut, terima kasih sekali *gitu*, tetapi kalau kita melihat dari 2022 itu dengan dibangun 74 di desa itu masih tertinggal 379 desa plus ibukota kecamatan.

Nah berbicara 2023 ya, berbicara 2023 kami mengusulkan ya, mengusulkan agar kalau bisa 100 desa, Pak. Walaupun nanti kalau terealisasi 100 desa ini masih tertinggal 353 desa plus ibukota kecamatan, tapi anggarannya kami pernah hitung-hitung dengan teman-teman PLN itu sekitar 441 miliar seperti ini kondisinya.

Artinya 353 desa atau ibukota kecamatan yang belum masuk listrik, jelas slogan saya itu tidak ada listrik tidak ada kebahagiaan Pak Dirut, tidak ada listrik tidak ada kebahagiaan dan bagi kami 3 Anggota DPR RI Komisi VII dari Kalteng ini ya artinya menjadi sasaran yang tidak nyaman dalam hal ini. Saya yakin juga kalau nanti rezimnya Pak Dirut ini mampu menuntaskan dan menyelesaikan masalah listrik tidak hanya di Kalteng menurut saya, tetapi fokus kita bantu saja seluruh desa yang ada di Indonesia ini ya, kemudian rumah tangga yang ada tadi juga Pak Dirut menyampaikan ada 3 juta rencana penyambungan baru ya.

Tentu itu kebanyakannya harusnya diprioritaskan di daerah-daerah yang memang minim ya, tidak sentral di Jawa atau di Sumatera yang sudah maju. Tentu adalah di daerah-daerah tertinggal seperti Kalimantan dan juga mungkin Papua, *nah* ini problem.

Saya usulkan percepatan itu ya walaupun istilahnya melanggar-langgar sedikit komitmen kita untuk *green* energi, tetapi harus dilakukan dengan tugas pembantuan Pak Dirut. Artinya itu juga sudah kami usulkan kami bertiga, Pak Mukhtarudin dan Haji Iwan Kurniawan untuk mengusulkan kepada pemerintah agar melalui Menteri Keuangan untuk memberikan anggaran pembantuan untuk membangun listrik-listrik, khususnya di Kalteng, mungkin juga tadi di Kalbar dan Kalimantan Utara untuk percepatan, untuk percepatan. Jadi saya tidak bicara tentang *over supply*, kalau di sini memang listriknya pun tidak ada *gitu* ya.

Nah maka untuk itu sekali lagi saya ingin meminta perhatian Pak Dirut dan jajaran PLN ya yang saya tahu juga sudah berupaya keras juga karena walaupun saya pahami Pak Dirut, kami juga sudah memanggil Gubernur, kemudian Bupati, Walikota, Pimpinan DPR karena pembangunan listrik ke desa itu juga tergantung dengan infrastruktur ya yang harus tersedia.

Nah itu juga sudah kami mengupayakan tetapi tadi saya katakan jalan-jalan yang terakhirnya itu adalah tugas pembantuan kita kirim saja diesel-diesel yang saat ini sudah dicabut di mana-mana *gitu* untuk percepatannya sambil menunggu ya pemasangan-pemasangan yang normal ya, kalau tidak ini tidak akan bisa *gain*, Bapak sudah tidak jadi dirut, mungkin Bapak jadi menteri dan teman-teman juga sama seperti itu, tetapi tidak meninggalkan *legacy* yang mantap untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia ini.



Tetapi untuk itulah saya dari hati yang paling dalam atas nama rakyat Kalteng memohon kepada Pak Dirut ya untuk membantu Kalimantan Tengah untuk Kalteng ini terang. Cuman itu aja Pak Dirut, yang lain saya sangat menghormati dan menghargai upaya-upaya yang sedang dilakukan oleh PLN, tetapi saya berharap agar fokus untuk Kalteng yang memang provinsi yang paling tertinggal dalam hal listrik desa dan listrik rumah tangga, tidak ada listrik tidak ada kebahagiaan.

Terima kasih.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Pak Willy terima kasih.

Mohon tidak hanya Pak Dirut PLN saja didoakan jadi menteri, tetapi teman-teman Komisi VII juga Pak.

Kami lanjut Pak Andi Ridwan Wittiri, silakan Pak.

F-PDIP (H. ANDI RIDWAN WITTIRI, S.H.):

Siap. Terima kasih

*Bismillahirrahmanirrahim,
Asalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Yang kami hormati Pimpinan dan seluruh kerabat Anggota Komisi VII, yang hadir secara fisik dan *virtual*,
Yang saya hormati Pak Dirut, senyum-senyum tadi *nih* waktu didoakan jadi menteri, aduh senang mendengarnya, mudah-mudahan, biasanya omongan itu adalah doa Pak Dirut, jadi kalau kita ngomong itu adalah bagian daripada doa. Yang saya hormati seluruh jajaran PT PLN, yang hadir di hari ini.

Saya langsung aja Pak Dirut bahwa di Sulawesi Selatan itu ada 2 Anggota DPR RI di Komisi VII, yaitu Ibu Andi Yuliana Paris dari Fraksi PAN dan saya sendiri Andi Wittiri dari Fraksi dari PDI Perjuangan. Tapi kita juga kadang-kadang mau berbagi terkendala dari dapil, saya Dapil 1, Ibu Andi Dapil 2, di Dapil 3 ini *nggak* ada Anggota Komisi VII yang ada di Dapil 3.

Sehingga saya mau mengusulkan, apakah boleh umpamanya di Dapil 3 itu di Sulawesi Selatan itu yang tidak ada Anggota DPR RI Komisi VII, kalau ada yang bermohon apakah boleh saya atau Ibu Andi Yuliani Paris memberikan masyarakat yang ada di sana.

Interaktif sedikit Pak Dirut.



DIRUT PT PLN (PERSERO):

Dipersilakan Pak Andi Wittiri.

F-PDIP (H. ANDI RIDWAN WITTIRI, S.H.):

Baik, terima kasih Pak Dirut.

Karena saya kebetulan Ketua DPP PDI Perjuangan Provinsi Sulawesi Selatan, jadi kalau saya kaish Dapil 1 saja, terus Dapil 2 ada Ibu Andi, Dapil 3 bilang ini kita *nggak* dapat ini. Ini kan negara ini sudah merdeka, kita juga ingin merdeka.

Yang kedua, saya sangat terima kasih karena sudah diberikan listrik gratis kepada masyarakat di Sulawesi Selatan dan akan datang akan dikasih lagi sekitar 80.000 ya Bu, kalau *nggak* salah ya Ibu Eddy ya, kalau *nggak* salah. Itu terima kasih banyak sudah dikasih.

Yang berikutnya adalah listrik di pulau-pulau terluar, jadi bukan hanya di Jawa saja, atau di Kalimantan, atau di Papua-Irian, di Maluku, di Sulawesi Selatan itu Pak, banyak pulau-pulau terluar, salah satu adalah pulau kepulauan Kabupaten Kepulauan Selayar.

Itu banyak sekali pulau-pulaunya, sehingga saya sangat berharap walaupun sekarang sudah dilaksanakan oleh PT PLN yaitu memberikan seperti tempat nge-charge, nge-charge baterai. Jadi PLN saya lihat itu sudah ada agendanya sudah ada program, jadi ada satu tempat, ada satu baterai di-charge baterai itu dibawa pulang ke rumah, terus baterai itulah yang menyinari rumah itu, kalau bisa diperbanyak itu Pak Dirut, Ibu Eddy di pulau-pulau itu, itu sangat menyenangkan, masyarakat sangat sekali. Disamping itu juga kita kalau bisa pakai sinar matahari juga lebih bagus.

Yang berikutnya adalah *power plan* energi baru terbarukan, di Sulawesi Selatan di samping ada sinar matahari dan sekarang sudah ada Bayu Pak yang ada itu di Jeneponto sama Sidrap. Di Sulawesi Selatan itu Pak Dirut banyak sekali sungai yang bisa kita jadikan pembangkit dan itu sangat deras yaitu Sungai Seko, ada juga di Pinrang, ada di Luwu Utara dan sebagainya itu bisa kita tingkatkan itu dan kadang-kadang mereka mempertanyakan, apakah bisa masuk RUPTL PT PLN.

Saya bilang ajukan saja supaya kita bisa mendapatkan energi dari sungai itu, karena sungai itu adalah bagian daripada energi terbarukan atau *green energy*.

Berikutnya yang saya mau sampaikan bahwa di Sulawesi Selatan atau di Sulawesi banyak sekali perusahaan yang membutuhkan *supporting* dari PT PLN. Apalagi kalau kita berbicara *green* energi, ada beberapa perusahaan datang ke saya ingin sekali mendapatkan *support* dari PLN terhadap pembangkit dan mereka sangat mengharapkan kalau *green* energi, jangan lagi pakai batubara atau diesel.



Ini Pak Menteri, eh kok keceplosan mudah-mudahan doa dan omongan saya jadi benar. Jadi mereka itu sangat mengharapkan itu bisa *green* energi, jadi tidak lagi pakai batubara dan listrik.

Beberapa yang mereka sudah melakukan permohonan untuk bertemu dengan PT PLN, *insya* Allah saya akan laporkan ke direksi bahwa beberapa perusahaan ini akan diskusi dengan PT PLN, mudah-mudahan Ibu Eddy, Pak Dirut beserta jajarannya bisa di-*follow up* itu dan *insya* Allah akan secepatnya menjadi pasar kita. Jadi jangan hanya sentralisasi di pulau Jawa saja, tapi di luar Jawa ini banyak sekali industri yang membutuhkan *supporting* dari PT PLN.

Yang satu dari terakhir, terhadap pelayanan pelanggan baik di Jawa maupun di daerah. Ini hanya diskusi saja, hanya masukan, kadang-kadang kalau ada orang permohonan baru atau penambahan daya di rumah. Kadang-kadang yang telepon itu Pak, dari petugas PLN itu 5 yang telepon, di mana rumahnya, di mana ininya, contoh saya sendiri, Pak.

Saya memasang rumah saya sambungan baru atau tambah daya, 1 hari itu bisa 5 yang telepon saya. Saya bilang gimana *nih* kalau 1000 pelanggan, berarti 5.000 orang yang harus telepon kepada pelanggan itu. Sehingga saya diskusi, ini mudah-mudahan bisa dirampingkan, jadi satu aja yang telepon supaya pelanggan juga merasa nyaman kalau PT PLN ini memang hebat. Cuma satu kata satu perbuatan, satu orang telepon bisa tersambungin langsung.

Terakhir, saya terima kasih kepada PT PLN yang sebesar-besarnya bahwa di dapil saya dapat CSR yaitu beberapa bantuan ambulans kepada masyarakat dan mereka sangat senang sekali PT PLN berada di tengah-tengah masyarakat dan kami sebagai Anggota Komisi VII menyampaikan terima kasih kepada PT PLN yang sudah memberikan kepada yayasan atau masyarakat berupa ambulans gratis.

Sekian, terima kasih.

*Wabillahittaufig wal hidayah,
Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Merdeka.

F-PKB (H. ABDUL KADIR KARDING, S.Pi, M.Si.):

Ini *ambulance*-nya harus jangan cuma Pak Wittiri ini seluruh Anggota *nih* Mas Ketua.



KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Minimal Anggota yang masih tersisa di ruangan.

ANGGOTA KOMISI VII DPR RI :

Kalau ini saya protes ini *ndak* saya suruh pulang kalau *nggak* ada ini.

F-PDIP (H. ANDI RIDWAN WITTIRI, S.H.):

Pak Karding bermohon Pak, kalau *nggak* bermohon *nggak* dikasih loh, tapi yayasan bukan kita Pak, masyarakat yang bermohon.

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Silakan lanjut Pak Bambang Hermanto, silakan Pak.

F-GOLKAR (BAMBANG HERMANTO, S.E.):

Baik, terima kasih Pimpinan.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat siang dan salam sejahtera.

Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi VII yang saya hormati,
Pak Dirut PLN beserta seluruh jajarannya.

Pak Dirut, yang pertama saya ingin menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih dari masyarakat kami di Indramayu Pak, Indramayu dan Cirebon atas realisasi program BPBL kemarin, meskipun itu baru sebagian. Meskipun baru sebagian tapi masyarakat begitu senang Pak ketika rumahnya mendapat sambungan baru.

Lalu kemudian persoalan yang terjadi Pak salah satunya terkait dengan BPBL ini adalah data yang digunakan oleh PLN ini tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Jadi kalau selama ini ada DTKS ya itu juga tidak sesuai dengan database yang digunakan oleh PLN, jadi ini selalu menjadi masalah.

Oleh karena itu saya menyampaikan hal ini sudah kesekian kalinya Pak untuk, khusus untuk usulan pemohon BPBL agar menggunakan data sesuai dengan kondisi di lapangan Pak, supaya ini tidak terjadi lagi usulan yang sudah kita sampaikan, yang sudah sesuai dengan fakta di lapangan, tapi kemudian tidak terealisasi, alasannya tidak terdapat di dalam database PLN.

Jadi sekali lagi saya mengusulkan, menyampaikan dan minta supaya usulan BPBL ini tidak menggunakan data, baik dari DTKS maupun data PLN, tetapi menggunakan data yang sesuai dengan kondisi di lapangan.



Lalu kemudian beberapa bulan yang lalu kita berkunjung ke salah satu desa di Indramayu, di mana desa ini jauh dari apa namanya jaringan ya, ada di tengah-tengah hutan, di tengah-tengah sawah ada kurang lebih 300 KK Pak Dirut. Usulannya sudah saya sampaikan, kemarin juga kita berkunjung dengan Bu GM Bu Susi ya *alhamdulillah* sampai di kampung itu, ada 300 KK yang belum menikmati listrik, Pak.

Inikan sangat ironis sekali di Indramayu yang jaraknya kalau pakai jalan tol kurang lebih 2 jam udah sampai sekarang Pak ya, 150 sudah 200 kiloan lah itu. Tapi sangat ironis ketika melihat ada satu kampung di sana belum menikmati listrik Pak, ada namanya Desa Cikawung Bu, sudah disurvei oleh PLN juga dengan Kementerian ESDM kemarin. Dan saya berharap desa ini yang sudah kita usulkan calon penerimanya, ini bisa segera ditarik jaringan baru supaya bisa segera terpasang listriknya ke rumah masing-masing.

Berikutnya di depan rumah saya, ini kebetulan rumah saya di Pantura dekat dengan PLTU Indramayu di Sukra, deket Pak 5 kilo, Pak. Jadi saya rumahnya di Pantura kalau PLTU kan masuk Pak ya kurang lebih 5 kilo lah, ini sebelahnya ada rencana pembangunan PLTU 2 yang sampai dengan hari ini masih mangkrak *kan*, Pak.

Sudah terbangun kalau *nggak* salah itu Jitetnya ya, transmisinya juga sudah terpasang itu sampai ke Mandirancan kalau *nggak* salah, tapi kemudian lahannya ini kan luas Pak, kurang lebih sekitar yang saya tahu 235 hektar dan ini menjadi persoalan tersendiri, Pak. Persoalan baru untuk masyarakat sekitar karena lahan ini *kan* sudah milik PLN sebagian, mungkin ya sebagian atau sudah semuanya, tapi *kan* sama PLN tidak dikuasai, tidak dikelola. Akhirnya pemilik yang lama atau orang baru kemudian sekarang menguasai menggarap lahan itu Pak, yang terjadi akhirnya sering terjadi keributan.

Oleh karena itu saya sebagai wakil dari dapil yang ada di depan, yang ada di sana, saya berharap lahan ini bisa segera dimanfaatkan, baik itu misalnya kalau itu diteruskan dibuatkan pembangkit saya kira kalau sekarang *nggak* mungkin Pak ya.

Tapi kalau misalnya ada perencanaan akan dibuatkan apa namanya dengan menggunakan energi terbarukan, saya kira ini bisa akan mengurangi persoalan yang ada di kampung saya *nih* Pak Darmo. Oleh karena itu saya mohon menjadi perhatian ini karena ini selalu menjadi persoalan di kampung kita ini Pak di sana.

Saya kira demikian usulan dari saya, terima kasih.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.



Terima kasih Pak Bambang atas masukannya.

Sebelum saya berikan kesempatan untuk Pak Dirut menjawab, saya ada beberapa pertanyaan ringkas saja Pak Dirut. Pertama mengenai SPKLU Pak, ditargetkan SPKLU kita tahun 2025 itu sampai sudah mencapai 6.318, per 2022 jumlahnya 570 atau dan di antaranya 502 itu ada di Jawa.

Artinya dengan jumlah kendaraan listrik yang jumlahnya 32.000 hari ini, rasio antara SPKLU dengan kendaraan itu 56 berbanding 1. Sementara di negara-negara yang sudah lebih maju memang tidak bisa kita bandingkan, tetapi sebagai referensi saja Amerika itu 20:1, Norwegia 24:1, China yang paling agresif 6,5:1.

Tetapi yang mengkhawatirkan saya adalah target kita di tahun 2025 meskipun saya rasa ini target juga sangat jauh kita sudah mencapai 2 juta kendaraan listrik dengan SPKLU-nya itu yang tadi saya sebutkan 6.318, artinya rasio masih 50 berbanding 1 Pak.

Nah ini bagaimana PLN mensiasati hal ini, terutama kita melihat bahwa sekarang ini kendaraan listrik sudah meningkat dari *trend* menjadi *change*, jadi *environment trend* menjadi *environment change*, jadi sesuatu hal yang kemudian akan menjadi pola hidup masyarakat baru ke depannya. Itu yang pertama Pak.

Kedua, saya ingin masukan dari Pak Dirut yang ini tertulis saja Pak, mengenai kondisi dari pengembangan gardu induk Tanggeung di Cianjur. Ini aspirasi dapil Pak, sudah ada pengembangan, Pak Wiloyo juga sudah pernah informasikan saya tetapi saya ingin mendapat update terakhir terkait hal ini Pak.

Dan kepada Ibu Eddy saya sampaikan, saya masih menunggu kabar Bu, ini aspirasi dari masyarakat yang saya datangi, bukan dapil saya tetapi ini di Kabupaten Sumenep, Desa Pagerungan Besar, Kecamatan Sapeken, 3 bulan masih belum mendapatkan kabar tentang listrik yang memang sudah sedang diupayakan. Jadi dan saya sudah komunikasi langsung ke Bu Edi, mohon itu saya minta masukannya Bu, saya janji hari ini saya sampaikan ini kepada Direksi PLN.

Nah itu Pak masukan dari kami, mengingat waktunya juga sudah lanjut dan dari tadi saya lihat Pak Dirut sudah mulai merogoh boks makanannya ini sampai habis. Saya beri kesempatan Pak Dirut untuk menjawab secara umum saja, nanti sisanya dijawab secara tertulis.

Kami persilahkan Pak.

DIRUT PT PLN (PERSERO):

Terima kasih Pimpinan dan para Anggota Komisi VII yang kami hormati.



Kami merasa bahwa RDP seperti ini adalah suatu *drive* bagi kami untuk memperbaiki kinerja, kemudian juga terbukti di kalau mengingat di tahun 2021 selama Bulan Desember sampai dengan akhir Bulan Februari kondisi, Tim PLN dalam kondisi yang sangat kelelahan di mana kondisi sistem kelistrikan yang sempat sangat kritis baru teratasi di Bulan Februari sampai Maret di tahun 2022.

Tetapi kami mengakui dengan adanya dukungan luar biasa dari Komisi VII DPR RI, Kemudian pada waktu itu saya masih ingat salah satunya adalah Pak Maman yang kemudian juga sangat keras pada waktu itu, bagaimana kontrak-kontrak batubaranya diminta untuk dibedah satu persatu.

Kemudian kami juga melakukan pembedahan itu, *alhamdulillah* tahun ini kondisinya berbeda di mana kondisi sistem ketenagalistrikan sudah aman dan untuk itu kami dalam RDP ini kami merasa mendapatkan masukan agar proses transformasi ini tidak berhenti ada di sini, tetapi akan kita kembangkan lebih lanjut.

Nah untuk itu ada beberapa hal, pertama adalah tapi kami harus mengakui di listrik antara Jawa dengan Madura mengalami sedikit gangguan dan ini mungkin bisa ditampilkan gambar-gambarnya. Kami mengakui di setahun lalu ada gangguan transmisi antara Jawa dengan Madura di sisi Surabaya-nya, kemudian hari ini hari Jumat kemarin ada gangguan kembali berulang tetapi di sisi Madura-nya.

Jadi kemarin begitu ada gangguan kami langsung datang ke lokasi dan ternyata gangguannya adalah di sambungan transmisi antara sisi daratnya dengan sisi lautnya karena kabel yang di sisi daratnya itu statis yang sisi lautnya ternyata ada vibrasi, sehingga ada gangguan tetapi kami kemudian tahun lalu sudah kami perbaiki Pak, yang untuk sisi yang Surabayanya, hari ini yang di sisi Maduranya ini sedang dalam perbaikan.

Ini kami sudah mengidentifikasi di titik mana karena memang dengan adanya jembatan ini kebetulan kabelnya ditanam di bawah jalur motornya Pak dan itu butuh membuka beton dan lain-lain. Untuk itu kami pertama ingin mohon maaf atas ketidaknyamanan dari Pulau Madura, kami sudah mengusahakan Pak bahwa ini perbaikannya secepat mungkin.

Kemudian kami juga sudah berkomunikasi langsung dengan masyarakat di Madura, termasuk pemadaman bergilirnya kami usahakan tiap rumah tidak lebih dari 3 jam dan dengan kurun waktu yang tertentu. Kemudian juga kami sudah menyebarkan puluhan ribu lampu yang ada baterainya, sehingga pada waktu ada pemadaman yang bergilir tersebut rumah tersebut masih ada penerangannya.

Kemudian juga pemadaman bergilir mulai sekitar jam 5 sore sampai jam 10 dan itupun dalam jumlah yang masih terkendali. Jadi kebutuhan sekitar 260 megawatt kemudian ada dua kabel, yang kebetulan satu kabelnya saat ini dalam perbaikan, tetapi kabel ketiga dan keempat juga langsung begitu ada



gangguan tahun lalu sudah kami dalam proses pembangunan dan akan selesai di bulan Maret nanti.

Jadi *redundancy* dari sistem dari Jawa ke Madura nanti udah bisa kami selesaikan di bulan Maret tanggal 22 dan perbaikannya sedang berlangsung *on going*. Ada beberapa direksi yang terpaksa kami turunkan yang ada di sana, yaitu Direktur Transmisi GM-nya, beberapa GM tim lapangan sedang bekerja. Jadi sekali lagi kami mohon maaf dan ini sedang dalam proses penyelesaian.

Kemudian tadi mengenai *over supply* tadi juga sudah kami jelaskan, kemudian dari Bu Roro Bagaimana di JIIP Freeport. Ini kolaborasinya sedang *on going*, jadi kami mengucapkan terima kasih sekali dengan adanya penambahan *demand* seperti ini karena hal-hal seperti inilah yang sebenarnya bisa mengurangi *take or pay* secara cepat.

Jadi kami mengucapkan terima kasih, kemudian kami menyiapkan dari GI-nya, kemudian pasokan listriknya dan termasuk juga kemungkinan nanti menggunakan *renewable* energi sertifikat.

Kemudian untuk yang program sosial di dapil masing-masing nanti kami akan ada diskusi lebih lanjut, tadi Bu Katherine kami mengucapkan terima kasih atas masukannya ya Bu ya. Kami juga ini saya tadi langsung ngecek seperti apa PMN, ada PMN berapa anggarannya, apakah anggarannya sudah mencukupi.

Misalnya di Kalbar ini ada dari PMN Bu untuk melistriki 173 desa Bu dan ini sesuai dengan arahan dari kami ini sudah lebih besar dari usulan anggaran yang dimintakan oleh provinsi proposal gitu, tapi ini mungkin perlu dikomunikasikan lebih lanjut Bu.

Kemudian dari 173 desa ini mungkin perlu ada diskusi lebih lanjut Bu, desa mana saja lebih detail ya Bu ya. Terus anggarannya ada 650 miliar, jadi ini karena ada dana PMN baru segar turun sehingga ini sebenarnya sudah ada perubahan, tapi mungkin dengan tadi ada usulan tadi nanti dokumen ini kami sampaikan ke GM di sana. Kemudian dari anggaran itu bagaimana ini bisa direkonsiliasi disinkronkan itu dari dana yang ada dengan aspirasi dari masyarakat. Sehingga dana PMN ini juga nanti alokasinya bisa tepat sasaran begitu.

Jadi kami mengucapkan terima kasih atas masukan di sini, kemudian nanti ada mengenai transmisi ada penjelasan nanti, mohon izin Pimpinan kami laporkan secara tertulis Bapak.

Kemudian juga tadi dari Pak Asman Abnur bahwa ini membangun organisasi ini suatu langkah yang positif, tetapi operasionalnya seperti apa. *Nah* memang dari kami sendiri misalnya untuk pelayanan terhadap pelanggan begitu, kami membangun perbaikan secara operasional bagaimana tata kelola di lapangan, kami datang juga ke kantor cabang kami, kantor ranting kami.



Kemudian untuk GM-GM wilayah dan kami mengidentifikasi apa kelemahannya dan bagaimana memperbaikinya. *Nah* memang bagaimana mensinkronkan antara organisasi ini *high level* yang ini memang harus dilakukan, tetapi juga dalam proses ini secara operasional harus dijalankan secara bersama-sama.

Kemudian untuk jadi nanti dari Pak Ridwan, Andi Ridwan Wittiri kami terima kasih juga Pak, untuk perusahaan-perusahaan yang sedang dalam proses ini kami juga sedang merancang suatu akselerasi pembangunan *renewable energy*.

Jadi dengan adanya penambahan *demand* ini kami juga merancang skenario-skenario bagaimana penambahan *renewable energy* dalam skala yang besar ini bisa dimasukkan dalam perencanaan masa depan. Jadi tadi masukan tadi sangat beresonansi dengan apa yang kita lakukan.

Kemudian juga untuk dari Pak Eddy Soeparno Pak, kalau kita berbicara mengenai mobil listrik kemudian adanya suatu perubahan gaya hidup, Pak. Memang kami mengakui pertama adalah yang kami tekankan saat ini adalah bagaimana setiap pembelian mobil langsung diikuti dengan pemasangan *home charging*, Pak.

Sehingga dalam hal ini kegiatan sehari-hari mobil biasanya untuk *commute* antara rumah ke kantor yang penting itu tertangani dulu karena begitu *home charging*-nya bisa dipasang, kemudian langsung proses sistem digital kami tersambung, rata-rata mobil saat ini sekitar 350 km per *charging*, sehingga untuk *commute* itu aman dulu tetapi tentu saja misalnya untuk mudik menggunakan mobil listrik ceritanya akan berbeda, Pak.

Inilah yang dibutuhkan SPKLU dari misalnya dari Jakarta sampai ke Lampung, dari Jakarta sampai ke Palembang, dari Jakarta sampai ke Cirebon, sampai ke Solo, ke Jogja bahkan ada Surabaya. *Nah* itu dua hal yang mungkin menjadi perhatian kami, tentu saja prioritas pertama kami ya *home charging* dulu.

Jadi begitu ada pembelian *day to day*-nya masih aman, tapi untuk kedepannya kami harus mengakui itu harus juga diselesaikan karena sejalan dengan waktu mobil listrik bukan lagi hanya sebagai *commute* tetapi juga untuk perjalanan luar kota. *Nah* ini yang perlu disiapkan ultra *fast charging*.

Nah untuk itu kalau kita berbicara 2 juta mobil target 2025 atau mungkin 2027 begitu kira-kira 5 tahun lagi, Pak. *Nah* ini membutuhkan *charging station* yang jumlahnya sangat banyak, bukan untuk *commute*-nya, kalau untuk *commute* aman karena *charging* semalam 3-4 jam itu sudah 350 km, sehari untuk *commute* tidak mungkin Pak 350 km.

Nah untuk itu kami harus mengakui kalau jumlah *charging station*-nya 10.000-15.000 sudah jelas PLN tidak punya lahannya, Pak. Artinya kami harus membangun suatu ekosistem di mana kondisi untuk berinvestasi di *charging*



station. Ini seperti mohon maaf *nih* nyebut *brand* itu misalnya McDonald, orang yang punya lahan kenapa bangun McDonald? Karena menguntungkan.

Nah untuk itu kami perlu membangun suatu ekosistem di mana ada *franchising*, kalau mereka punya lahan parkir pasang *charging station* di sana dengan investasi bersama dengan pihak ketiga, itu menguntungkan Pak. *Nah* tentu saja ada faktor-faktornya harga listriknya kalau dipepet-pepet murah tentu saja *commercial investment*-nya *visibility*-nya mungkin agak kurang, Pak.

Kalau misalnya dibebaskan seperti beli kopi di Starbucks dibanding nyeduh kopi di rumah harganya mungkin 15 kali lipat, tapi itu gaya hidup. Yang penting apa? Punya opsi untuk bikin kopi di rumah atau *home charging* juga bisa yang murah sekali, kalau mau di luar ya agak mahal sedikit *nggak* apa-apa karena itu gaya hidup kepingin nge-charge di luar misalnya seperti itu.

Kemudian kami juga sudah membangun *franchising* yang saat ini sudah berjalan walaupun nanti tantangan yang ada adalah skala ekonominya masih belum masuk Pak, jadi begitu dipasang ternyata yang nge-charge masih belum sebanyak yang kita perkirakan.

Nah salah satunya dari survei kami, kenapa *kok* yang nge-charge sedikit? Karena begitu kebutuhannya untuk *commute* bukan perjalanan luar kota ternyata kebutuhan untuk nge-charge di dalam kotanya hampir, hampir kecil sekali Pak, masih kecil sekali. Jadi tapi ke depan dengan jumlah mobil yang listrik semakin banyak.

F-PKB (H. ABDUL KADIR KARDING, S.Pi, M.Si.):

Terutama ini Pak, kendaraan komersial bukan ini, bukan pribadi ya, komersial Pak ya.

DIRUT PT PLN (PERSERO):

Betul.

F-PKB (H. ABDUL KADIR KARDING, S.Pi, M.Si.):

Yang punya mobilitas tinggi, Ojol ke depan ya Pak ya, taksi Ojol, terus kemudian juga mungkin bis ya, bis listrik itu mungkin kebutuhannya tinggi.

DIRUT PT PLN (PERSERO):

Nah untuk yang Ojol memang diperlukan itu baterai *replacement center* Pak, jadi ini juga sedang kita rancang. Ini bisnis modelnya sedang kita kembangkan Bapak Pimpinan, jadi dengan berbagai kerjasama dengan pihak ketiga dan saat ini sedang berkembang Pak, ini sedang berkembang ya *insya* Allah dalam 1 tahun ini akan bisnis modelnya ada tiga atau empat ini akan lebih *mature*.

Jadi *tehnical* juga komersial *visibility*-nya juga akan meningkat, sehingga sejalan dengan waktu Bapak ini masukan yang luar biasa adalah bagaimana *at the end of the day* kita bisa membangun ekosistem bagi pihak ketiga untuk berinvestasi di sini dan PLN adalah bagian pondasi agar penyediaan listriknya bisa lancar, ekosistemnya bisa *tehnically* dan *commercially* ini juga bisa baik dan bisnis modelnya juga *fly* Pak, karena tanpa adanya itu pihak ketiga tentu saja investasinya akan sangat berkurang.

Kemudian untuk Bapak-Ibu Komisi VII untuk aspirasi masyarakat dari dapil masing-masing saya juga menugaskan nanti dari Tim PLN untuk komunikasi lebih lanjut, tapi masukan dari Bapak-Ibu Komisi VII ini adalah suatu masukan yang sangat berharga bagi kami, bagaimana kami bisa meningkatkan kinerja kami itu adalah dengan adanya komunikasi seperti itu.

Mungkin kami tutup dengan pantun Bapak.

Di Kalimantan ada Derawan,
Pulaunya elok di tengah lautan,
Dari Komisi VII kami mendapat arahan,
Siap laksanakan membangun energi berkeadilan.

Terima kasih.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Baik, terima kasih.

Mari sekarang kita bacakan draf kesimpulan dari Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan Dirut PT PLN (Persero), Rabu 8 Februari 2023.

1. Komisi VII DPR RI mengapresiasi Dirut PT PLN (Persero) yang telah meningkatkan kinerja pada tahun 2022, termasuk dalam hal menjaga pasokan energi primer pembangkit sehingga didapatkan Hari Operasi Pembangkit (HOP) rata-rata di atas 20 hari.

Setuju?

**(RAPAT:SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

2. Komisi VII DPR RI mendukung Dirut PT PLN (Persero) untuk merealisasikan program-program strategis yang telah direncanakan, sehingga dapat berkontribusi terhadap pendapatan negara sekaligus bermanfaat bagi masyarakat.

Setuju ya?



**(RAPAT:SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

3. Komisi VII DPR RI mendesak Dirut PT PLN (Persero) untuk mendalami potensi-potensi dalam mengurangi *over supply*, seperti kesiapan penyediaan tenaga listrik untuk industri-industri yang saat ini sedang dibangun.

Setuju Ibu-Bapak?

DIRUT PT PLN (PERSERO):

Mohon izin Pimpinan, apakah untuk itu karena kami ini sebagai korporasi mungkin mendesak PT PLN (Persero) sebagai korporasi, Pak.

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Baik, jadi PT ya *oke* baik.

Jadi kita ubah menjadi mendesak PT PLN (Persero) bukan Dirut PT PLN Persero ya.

Baik, setuju ya?

**(RAPAT:SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

DIRUT PT PLN (PERSERO):

Mohon izin Bapak, untuk poin 2 mungkin juga begitu Bapak.

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Oke, kalau *gitu* kita ini saja nomor 1, 2, 3.

F-PKB (H. ABDUL KADIR KARDING, S.Pi., M.Si):

Iya jadi ada mungkin, izin Pak Ketua.

Sebenarnya ada perbedaannya kalau dirut itu berarti segera kinerjanya dijalankan, kalau korporasi alamatnya ke mana, korporasi itu siapa. Jadi menurut saya juga *nggak* ada masalah Pak Dirut.

Pak Dirut pun juga *nggak* ada masalah, ini hanya penekanan supaya ini dijalankan karena kalau korporasi PLN ke siapanya kita juga terlalu luas karena Bapak yang memimpin di sana, makanya arahnya ke sana.



Menurut saya *sih* tetap dirut aja Pak Ketua, kalau korporasi itu terlalu bias.

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Kalau *nggak* gini aja Pak, kita memberikan tanggung jawab ini kepada dirut dan direksi, jajaran Direksi PLN ya. Bagaimana?

F-PKB (H. ABDUL KADIR KARDING, S.Pi, M.Si.):

Kalau namanya korporasi apapun tetap dia Dirut Utama tanggung jawab dan semuanya, soal nanti pendelegasian cara kerja itu soal kepemimpinan dan manajemen aja.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Iya baik, saya kira gimana Pak Dirut? Ya *oke*, jadi kita tidak berubah ya.

Komisi VII DPR RI mendesak Dirut PT PLN Persero untuk mendalami potensi-potensi dalam mengurangi *over supply*, seperti kesiapan penyediaan tenaga listrik untuk industri-industri yang sedang dibangun, nomor 3.

**(RAPAT:SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

4. Komisi VII DPR RI mendesak Dirut PT PLN untuk terus meningkatkan keandalan sistem kelistrikan di seluruh Indonesia dan menyiapkan langkah-langkah mitigasi agar tidak terjadi *blackout* kembali.

Ini tadi pesan Pak Asman Abnur ya, setuju Pak ya? Baik.

**(RAPAT:SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

F-GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):

Pak Ketua, sedikit interupsi.

Kalau Dirut PLN untuk tadi, industri-industri itu tolong, mana itu ya.

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Yang nomor 3, butir 3.



F-GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):

Mendesak Dirut PLN untuk mendalami potensi-potensi dalam mengurangi *over supply*, seperti kesiapan penyediaan tenaga listrik untuk industri-industri yang sedang dibangun ini juga kalau boleh Kementerian ESDM mempersulit industri-industri yang baru dibangun untuk membangun pembangkit listrik sendiri, kalau mereka membangun sendiri itu yang banyak terjadi, itu ada sekitar 5.000 megawatt itu.

Itu dilarang izinnya, itu baru laku ini listriknya PLN. Kita harus desak Menteri ESDM, jadi industri-industri itu punya pembangkit listrik sendiri, banyak *tuh*, itu izinnya supaya dipersulit oleh Kementerian ESDM harus beli listrik dari PLN, kira-kira *gitu* Pak Dirut ya, kalau itu mantap ya.

DIRUT PT PLN (PERSERO):

Untuk kebijakan kami mengikuti saja Pak, kami operasional Pak.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Harus ada Pak, iya tetapi kita nanti, nanti dalam pembahasan kita ya Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian ESDM kita bisa angkat karena kan kita sedang tidak bersama mereka.

F-GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):

Pak Ketua, melalui Pak Ketua.

Tolong TA catat, jadi kalau rapat dengan Menteri ESDM diingatkan. Kebetulan itu cukup besar itu, nanti kalau pembangunan lagi udah jangan dikasih izin membangun pembangkit listrik sendiri.

DIRUT PT PLN (PERSERO):

Pimpinan, kami menambahkan memang selama ini salah satu pertumbuhan *demand* kami yang paling besar adalah dengan pembangkit-pembangkit yang tadinya menggunakan, industri yang menggunakan pembangkit sendiri.

Kemudian dengan pelayanan kami yang kami tingkatkan dan juga premium dengan harga yang kompetitif ternyata banyak sekali pembangkitnya kemudian dimatikan Bapak, kemudian pindah ke kami dan itu yang kami sebut dengan *captive power* Pak. Jadinya *captive* dari industri kemudian berpindah itu salah satu pertumbuhan *demand* kita yang tertinggi Bapak.

Terima kasih Pak.



KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Baik Pak, baik Pak kita lanjut ke kesimpulan kelima.

5. Komisi VII DPR RI mendorong Dirut PT PLN Persero untuk menyediakan solusi digital yang terintegrasi, guna menunjang ketenagalistrikan yang andal melalui penggunaan internet dan pembentukan ekosistem berbasis energi bersih dalam rangka meningkatkan *value* koperasi, ekonomi digital masyarakat, serta kepuasan pelanggan.

Setuju Pak Dirut?

**(RAPAT:SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

6. Komisi VII DPR RI mendesak Dirut PT PLN Persero untuk meninjau isu-isu terkait regulasi pemasangan transmisi secara keseluruhan.

Jadi segera ditinjau Pak mengenai isu-isu ini, setuju ya Pak Dirut?

**(RAPAT:SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Ketujuh, Komisi VII DPR RI meminta Dirut PT PLN Persero.

F-PKB (H. ABDUL KADIR KARDING, S.Pi., M.Si.):

Pak Ketua, izin Pak.

Maksudnya isu-isu itu Pak.

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Tadi ada beberapa hal yang disampaikan oleh Pak Nasir, terkait masalah transmisi pemasangan, regulasi transmisi yang minta didalami lebih lanjut dan dimintakan masukan dan catatannya dari PLN.

F-PKB (H. ABDUL KADIR KARDING, S.Pi., M.Si.):

Isu Pak ya, ada bahasa lain *nggak* yang lebih bagus ya.

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Oke, untuk mengganti isu, untuk meninjau.



F-PKB (H. ABDUL KADIR KARDING, S.Pi, M.Si.):

Mungkin *anu* ya, permasalahan atau laporan-laporan yang, ya permasalahan *deh* saya kira, kalau isu itu jadi *nggak* menarik. Kalau isunya bener *oke* dan kalau kesimpulan isu itu *kan*.

ANGGOTA KOMISI VII DPR RI:

Ini maksudnya meninjau itu bagaimana Pimpinan, meninjau permasalahan, bukan menyikapi ya.

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Iya menyikapi aja, menyikapi permasalahan, *oke* setuju ya? Jadi kita mendesak Dirut PT PLN untuk menyikapi permasalahan terkait regulasi pemasangan transmisi secara keseluruhan, setuju ya Bapak-Ibu?

**(RAPAT:SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

7. Komisi VII DPR RI meminta Dirut PT PLN (Persero) untuk menyampaikan jawaban tertulis atas semua pertanyaan Anggota Komisi VII DPR RI dan disampaikan kepada Komisi VII DPR RI paling lambat tanggal 17 Februari 2023.

Pak Dirut setuju ya? *Oke*.

**(RAPAT:SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Baik, Bapak-Ibu sekalian.

Demikian rapat kita, sebelum kita tutup kami berikan kesempatan Pak Dirut untuk menyampaikan sambutan penutup.

DIRUT PT PLN (PERSERO):

Sekali lagi Pimpinan dan para Anggota Komisi VII DPR Republik Indonesia, kami mengucapkan terima kasih atas arahan, dukungan, bimbingan dan kerjasama yang dalam hal ini kami akan pedomani, kami akan melaksanakan, sehingga proses transformasi yang ada di PLN ini tidak akan pernah terhenti di sini dan kami terus membangun suatu korporasi yang lebih sehat lagi.

Terima kasih.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.



KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Pak Dirut PLN beserta jajaran, jangan berdiri dulu Pak, duduk dulu Pak.

Bapak-Ibu Anggota Komisi VII yang juga hadir bersama-sama kita dari awal sampai akhir dan pesan khusus ini kepada Pak Mamit yang sudah bergabung sebulan di PLN, tetap objektif, tetap kritis, jangan jinak.

Demikian kami sampaikan, dengan mengucapkan *alhamdulillah* rapat pada hari ini kami nyatakan ditutup.

*Wabillahittaufiq wal hidayah,
Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**(RAPAT DITUTUP PUKUL 14.22 WIB)
(KETOK PALU 3 KALI)**

a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,

Dra. Nanik Herry Murti
NIP. 196505061994032002

